



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I (Satu)
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala BNN, Kepala BNPT, Kepala PPAATK, Ketua LPSK dan Ketua Komnas HAM
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Selasa, 15 September 2020
Pukul : 10.00 WIB – 13.22 WIB
Tempat : RR. Komisi III DPR RI, Gd. Nusantara II DPR RI Lt.1
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : Pembahasan RKA K/L Tahun 2021
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
26 dari 51 orang Anggota Komisi III dengan rincian:

PIMPINAN

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M..

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan (virtual)
3. Idham Samawi (virtual)
4. Bambang D.H (virtual)
5. Arteria Dahlan
6. Marinus Gea (virtual)
7. Wayan Sudirta (virtual)
8. Agustiar Sabran (virtual)

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos, M.Si (virtual)
2. Ir. H. Sari Yulianti, M.T (virtual)
3. Supriansa, SH., MH.

/2. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH.
2. Romo H.R Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
(virtual)
3. Muhammad Rahul (virtual)
4. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M
2. Yessy Melania, S.E. (virtual)
3. Ary Egahni Ben Bahat, SH. (virtual)

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS.
2. H. Santoso, S.H

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Drs. H. Adang Daradjatun (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam (virtual)

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

--

B. Undangan:

1. Kepala BNN beserta jajaran
2. Kepala BNPT beserta jajaran
3. Kepala PPATK beserta jajaran
4. Ketua LPSK beserta jajaran
5. Ketua Komnas HAM beserta jajaran

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT/ F.PAN (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat kawan-kawan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Kepala BNN, Kepala BNPT, Kepala PPATK, Ketua LPSK dan
Ketua Komnas HAM beserta seluruh jajaran

Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat wal'afiat. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan rapat pada masa tatanan kehidupan normal baru dan berdasarkan Pasal 254 Ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib menyebutkan bahwa semua jenis rapat DPR RI dihadiri oleh Anggota kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya kegentingan yang memaksa keadaan luar biasa keadaan konflik bencana alam dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional. Rapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya bagi Anggota yang hadir secara virtual maka daftar hadir Anggota dapat dilakukan secara elektronik. Kehadiran Anggota tercatat dalam list partisipasi dalam aplikasi zoom. Ada pun RDP hari ini dilakukan secara fisik dan virtual dan hasil kesimpulan dalam RDP ini mengikat untuk Komisi III DPR RI dengan mitranya. Selanjutnya mengenai acara pertemuan hari ini yaitu:

1. Penjelasan mitra terkait dengan RKA Tahun Anggaran 2021,
2. Dialog dan tanya jawab.
3. Penutup.

Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 11.30 WIB?

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan catatan yang diberikan oleh Sekretariat Komisi III bahwa pagu anggaran Lembaga Negara tahun 2021 yaitu:

1. Badan Narkotika Nasional
 - a) Pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 1.689.992.511.000
 - b) Usulan tambahan sebesar Rp 234.054.960.000,
 - c) Tambahan untuk BNN belum disetujui di pagu anggaran tahun 2021 BNN sebesar Rp 1.689.992.511.000,
2. Badan Nasional Penanggulangan Teroris
 - a) Pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 515.919.444.000,
 - b) Usulan tambahan sebesar Rp 361.602.246.00,

- c) Tambahan anggaran BNPT belum disetujui di pagu anggaran tahun 2021 BNPT sebesar Rp 515.919.444.000,
- 3. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan
 - a) Pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 224.608.345.000,
 - b) Usulan tambahan sebesar Rp 29.984.656.000,
 - c) Tambahan anggaran PPATK belum disetujui di pagu anggaran tahun 2021 PPATK sebesar Rp 224.608.345.00,
- 4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - a) Pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 79.417.515.000,
 - b) Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 83.729.000.000,
 - c) Tambahan anggaran LPSK belum disetujui di pagu anggaran tahun 2021 LPSK sebesar Rp 79.417.515.000,
- 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 - a) Pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 100.231.120.000,
 - b) Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 374.676.970.000,
 - c) Tambahan anggaran Anggota Komnas HAM belum disetujui di pagu anggaran tahun 2021 Komnas HAM sebesar Rp 100.231.120.000,

Hadirin yang saya hormati,

Untuk mempersingkat jalannya rapat maka kami persilakan Kepala BNN untuk memberikan paparan terkait dengan RKA Tahun Anggaran 2021. Kemudian dilanjutkan dengan Kepala BNPT, PPATK, LPSK dan yang terakhir Komnas HAM. Saya harapkan singkat dan padat Pak.

Terima kasih.

Silakan.

KEPALA BNN (Komjen. Pol. Drs. HERU WINARKO, S.H.):

Baik Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi.

Yang mulia Pimpinan Komisi III DPR RI,
Anggota Komisi III DPR RI dan hadirin sekalian,

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas perkenannya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat mengikuti RDP bersama Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI masa persidangan pertama tahun 2020 – 2021. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan penjelasan atas pertanyaan Komisi III yang berkenaan dengan pembahasan RKA BNN Tahun Anggaran 2021. Namun demikian sebelum kami menyampaikan penjelasan atas RKA-K/L BNN Tahun 2021, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu gambaran perkembangan anggaran BNN sampai dengan tahun 2020. Dalam hal dukungan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan BNN

perkembangan alokasi anggaran yang diterima BNN cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Dapat dilaporkan realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 97,73% dengan pagu anggaran Rp 1,55 triliun. Sementara itu pada tahun 2020 anggaran BNN adalah sebesar Rp 1,76 triliun, namun karena ada kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah anggaran yang dikelola oleh BNN menjadi Rp 1,63 triliun. Dari anggaran tersebut realisasi sampai dengan 11 September adalah sebesar Rp 890 miliar atau 54,90%.

Pimpinan rapat dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Untuk tahun 2021 pagu anggaran BNN adalah sebesar Rp 1.689.992.511.000, pagu tersebut merupakan kompersi dari pagu indikatif yang dielaborasi dengan perubahan kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran RSPP yang telah disepakati oleh BNN, Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan. Anggaran Rp 1,68 triliun tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 532,7 miliar, belanja barang sebesar Rp 1,04 triliun dan belanja modal sebesar Rp 114,4 miliar. Ada pun dilihat dari distribusi per program ada sebagai berikut:

1. Untuk program P4GN alokasi anggaran sebesar Rp 525,6 miliar dan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 1,16 triliun,

Dengan besaran anggaran tersebut BNN akan lebih mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan prioritas baik yang sifatnya mendukung prioritas nasional maupun prioritas Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran strategis BNN. Proyek prioritas yang akan dilaksanakan BNN tahun 2021 mengarah kepada 14 *output* proyek prioritas nasional dengan total anggaran sekitar Rp 192,43 miliar. Di tahun 2021 BNN mengajukan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 273.054.960.000 untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang belum mendapatkan alokasi pada pagu anggaran tahun 202, diantaranya penyelenggaraan *IDEC Working Group*, dukungan untuk Perundang-Undangan dan regulasi, pelaksanaan dukungan rehabilitasi di beberapa wilayah serta pemenuhan sarana dan prasarana bangunan BNK, BNP di daerah.

Pimpinan rapat dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dapat memberikan dukungan pada BNN sehingga BNN mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan dapat menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dibidang P4GN.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Heru.
Silakan dilanjutkan untuk Pak Boy.

BNPT (Komjen. Pol. Dr. Drs. BOY RAFLI AMAR, M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat yang kami muliakan Pimpinan Komisi III DPR RI,
Yang kami hormati yang kami muliakan seluruh Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang hadir pada pagi hari ini,
Pimpinan Lembaga yang hadir pada rapat hari ini,

Terima kasih.

Sebagai umat bergama tentu tiada hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat sehat nikmat iman yang telah diberikan kepada kita dan pada pagi hari ini terima kasih kepada Pimpinan Komisi III terlebih dahulu atas dukungan yang telah diberikan kepada BNPT selama ini khususnya pada tahun anggaran 2020. Dalam pelaksanaan tugas di tahun 2021 yang mendatang BNPT tetap merujuk kepada visi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, dimana visi beliau adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam mewujudkan visi Bapak Presiden tersebut BNPT merumuskan dalam misi dari BNPT yang dapat kami jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasiskan penelitian,
2. Melaksanakan tindakan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme,
3. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme,
4. Melaksanakan pemulihan korban tindak pidana kejahatan terorisme secara optimal,
5. Melaksanakan deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme,
6. Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme,
7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional,

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi BNPT menggambarkan koridor strategis yang mengawal dan memastikan pelaksanaan strategi dilakukan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun. Arah kebijakan dan strategi memuat upaya strategis yang dilakukan BNPT dalam merubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diharapkan dengan konstren lingkungan strategis BNPT maupun kebijakan dan strategi nasional. Arah kebijakan dan strategi pada tahun 2020 – 2024 BNPT dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisme secara optimal, strategi yang diterapkan adalah penguatan regulasi penanggulangan terorisme berbasis kepada penelitian secara komprehensif atau lintas Kementerian dan Lembaga,
2. Pelaksanaan kerja sama internasional secara optimal, strategi yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah optimasi kerja sama internasional ditingkat bilateral, regional dan multilateral dalam penanggulangan terorisme,
3. Kesiap siagaan nasional sebagai antisipasi tindak pidana terorisme arah kebijakan ketiga adalah melaksanakan kesiap siagaan nasional sebagai bentuk antisipasi terhadap kejahatan terorisme, setretagi yang dilakukan adalah meningkatkan ketahanan nasional dan ancaman tindak pidana terorisme melalui kesiap siagaan nasional yang antara lain meliputi penyiapan aparatur negara dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat,
4. Melaksanakan kontra radikalisasi dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme arah kebijakan keempat adalah tentu dalam hal ini mencegah penyebaran paham radikal terorisme secara masif, strategi yang diterapkan pada kebijakan ini adalah melakukan upaya pelemahan kapasitas kapabilitas jejaring organisasi terorisme serta penyebaran paham radikal terorisme,
5. Deradikalisasi secara optimal dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah deradikalisasi terintegrasi secara efektif dan efisien,
6. Penegakan hukum penanggulangan terorisme dalam hal ini adalah mengoptimalkan kordinasi diantara penegakan hukum demikian juga penanganan krisis pasca terjadinya tindak pidana terorisme,
7. Pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal dalam hal ini kegiatan yang dilakukan melalui
 - a) Pemulihan korban tindak pidana terorisme baik secara fisik, materi maupun psikologi.
 - b) Perlindungan Aparat Penegak Hukum dan saksi tindak pidana terorisme secara optimal.
 - c) Sinergitas Kementerian Lembaga terkait dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme, sinergitas Kementerian Lembaga terkait dalam perlindungan saksi tindak pidana terorisme.
8. Reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional,

Di dalam pagu dan realisasi anggaran BNPT tahun 2020 secara garis besar dapat kami jelaskan bahwa di tahun 2020 BNPT menerima alokasi anggaran sebesar Rp 516.942.029.000. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 telah terjadi realokasi atau perubahan postur anggaran BNPT, dikarenakan terkait dengan pandemi covid-19 BNPT mengalami perubahan postur yang semula Rp 516.942.029.000 mengalami pemotongan sebesar Rp 76.123.380.000 sehingga anggaran BNPT tahun 2020 menjadi Rp 440.818.091.000. Dapat kami laporkan realisasi anggaran BNPT sampai dengan 9 September 2020 adalah sebesar Rp 274.620.945.500 atau sebesar 62,30% dari total anggaran sehingga sisa pagu BNPT tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 167.345.609.648 atau sekitar 37,70% dari total anggaran. Demikian terkait

dengan realisasi anggaran BNPT tahun 2020 sampai dengan 9 September. Selanjutnya kami mohon izin langsung terhadap pagu anggaran BNPT tahun anggaran 2021.

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor S92/MK.02/2020 B636/M.PPN/D8/KU01/08/2020 hal pagu anggaran Kementerian Lembaga dan penyelesaian rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2021 pagu anggaran BNPT tahun 2021 sama dengan jumlah pagu indikatif BNPT tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp 515.919.444.000 dengan rincian dalam satuan tiga sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar Rp 38.438.164.000,
2. Belanja barang operasional sebesar Rp 30.045.073.000,
3. Belanja barang non operasional sebesar Rp 374.792.000.000,
4. Belanja modal sebesar Rp 72.644.207.000,

Rancangan kerja BNPT tahun 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 515.919.444.000 akan dialokasikan untuk membiayai program penanggulangan terorisme yang terdiri atas 5 kegiatan sebagai berikut:

1. Penanggulangan terorisme bidang pencegahan perlindungan deradikalisasi sebesar Rp 158.555.608.000,
2. Penanggulangan terorisme bidang penindakan dan pembinaan kemampuan sebesar Rp 137.026.653.000,
3. Penanggulangan terorisme bidang kerja sama internasional sebesar Rp 27.736.230.000,
4. Dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp 190.387.236.000,
5. Pengawasan internal BNPT sebesar Rp 2.263.717.000,

Para hadirin Pimpinan yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan prioritas nasional BNPT tahun 2021 adalah pembangunan nasional jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 mengusung tema terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan 7 (tujuh) agenda nasional yang merupakan prioritas nasional. Dari 7 (tujuh) prioritas nasional tersebut BNPT berkontribusi pada prioritas nasional 7 (tujuh) yaitu memperkuat stabilitas Polhuk Hankam dan transformasi pelayanan publik. Tujuh kegiatan atau *output* prioritas nasional BNPT tahun 2021 yang termuat dalam matriks RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar paham radikal terorisme dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.133.232.000,
2. Kegiatan kontra radikalisisasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 65.315.934.000,
3. Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.290.605.000,
4. Kegiatan kesiap siagaan nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp 550.000.000,
5. Kasus tindak pidana terorisme yang berkekuatan hukum tetap dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.975.993.000,

6. Sasaran wilayah pelibatan secara terpadu Kementerian Lembaga pelaksanaan program penanggulangan terorisme dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.240.597.000,
 7. Kordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.906.866.000,
- Sehingga jumlah alokasi anggaran untuk prioritas nasional BNPT tahun 2021 adalah Rp 172.413.227.000.

Selanjutnya kami laporkan usulan tambahan anggaran BNPT tahun 2021 yang belum terakomodir di dalam pagu anggaran. Untuk dapat mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan BNPT sedang mengajukan usulan anggaran tahun 2021 pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan surat PL/01/02/409/2020 tanggal 9 September dengan rincian sebagai berikut:

1. Operasional BNPT tv chanel sebesar Rp 29.714.304.000. Kami laporkan kepada Pimpinan bahwa di dalam pelaksanaan pandemi covid-19 di dalam memaksimalkan diseminasi informasi kepada masyarakat termasuk propaganda secara terbuka kontra ideologi kontra radikalisme kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan memanfaatkan tv digital dimana konten-konten ini kami buat sekaligus sebagai bahan edukasi kami kepada masyarakat dan juga melakukan kontra secara terbuka bahwa BNPT tentu mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk dapat bersama-sama kita mewaspadai penyebaran paham radikalisme. Program-program yang kami susun memang antara lain adalah memproduksi berbagai program-program acara yang nanti akan kami sebar luaskan kepada masyarakat. Dikarenakan dimasa pandemi covid ini juga kegiatan untuk pelaksanaan tatap muka dari BNPT dengan masyarakat dapat dikatakan berlangsung secara terbatas.
2. Pembangunan serba guna BNPT sebesar Rp 40.246.344.000. Kami di BNPT saat ini belum memiliki gedung serba guna dan setiap kali kami membuat acara lalu kami memasang tenda dilapangan apel kami. Sedangkan dari lahan yang ada disana total 11 hektar kami melihat masih memungkinkan untuk dapat dibangunnya gedung serba guna yang dapat dimanfaatkan oleh staf kami ketika acara-acara berlangsung maupun dalam kegiatan mengundang masyarakat.
3. Pembangunan gedung administrasi layanan serta dokumen arsip Pusat Pelatihan dan Deradikalisasi sebesar Rp 60.369.216.000.
4. Penyusunan dokumen perencanaan gedung pusat BNPT di DKI sebesar Rp 6.383.871.000. Mohon izin dapat kami laporkan bahwa hari ini BNPT yang di DKI, dimana amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pun dinyatakan bahwa ditempatkan di Ibu Kota Negara. Dalam hal ini yang sedang kami upayakan adalah hari ini memohon kepada Sekretariat Negara untuk dapat diberikannya alokasi tempat dibangunnya gedung BNPT yang berada di Jakarta. Sebagai gambaran yang sedang kami ajukan adalah di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat. Sedangkan yang saat ini kami ajukan baru adalah biaya untuk perencanaan gedung sebesar Rp 6.383.871.000.
5. Pengadaan perangkat dan fasilitas gedung serba guna sebesar Rp 8.022.250.000.

6. Pengadaan perangkat fasilitas gedung administrasi layanan serta dokumen arsip dan Pusat Deradikalisasi Rp 10.027.813.000.
7. Pengamanan komunikasi dimana saat ini dari sisi security IT yang ada di BNPT belum memiliki sarana yang baik dimana pada kesempatan ini kami mengajukan sejumlah Rp 30.000.000.000.
8. Peningkatan sarana teknologi informasi Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdalsis) yang diamanatkan di dalam Undang-Undang yaitu dengan usulan tambahan sejumlah Rp 120.000.000.000.

Sehingga mohon izin kami laporkan kepada Pimpinan hasil dari rekap kami setelah dari pencermatan kami agak berkurang dari yang telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi dari Rp 361.000.000.000 total yang kami rekap dari hasil penghitungan kami sebesar Rp 304.764.098.000. Demikian Pimpinan yang dapat kami sampaikan selanjutnya kami mohon arahan dan ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pimpinan Komisi III beserta seluruh Anggota sekalian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Boy Rafli.

Selanjutnya kami persilakan Kepala PPATK dan kami ingatkan tolong yang untuk anggaran tahun 2021 saja yang disampaikan, karena anggaran tahun 2020 nanti ada forum lain untuk kita bahas bersama.

Silakan.

KEPALA PPATK (DIAN EDIANA RAE):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Dalam suasana PSBB ini semoga kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat serta senantiasa dalam lindungan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sehingga dapat menjalankan amanat masyarakat dalam membangun negara Indonesia yang kita cintai ini, *amin ya rabbal'alamin*.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,
Yang kami hormati Pimpinan Lembaga yang hadir hari ini Kepala BNN,
Kepala BNPT, Kepala Komnas HAM dan Kepala LPSK,

Sesuai dengan undangan dari Sekretariat Komisi III DPR RI hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan paparan terkait dengan RKA-K/L PPATK Tahun Anggaran 2021. Dalam menghadapi tantangan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme PPATK telah mengidentifikasi hal-hal strategis dan fokus pada rencana kerja tahun 2021 yang meliputi:

1. Terkait dengan implementasi GO AML. GO AML ini adalah sistem pelaporan yang baru ini sesuai dengan internasional best practice yang sekarang ini sudah diikuti oleh 64 negara,
2. Peningkatan kualitas sistem teknologi informasi. Dapat kami sampaikan Bapak-bapak yang terhormat, hadirin yang terhormat, bahwa memang hampir semua Lembaga Intelijen Keuangan di dunia pada saat ini sangat mengandalkan penggunaan teknologi sehingga memang kami juga sudah menyusun grand master, master plan kami untuk mencapai teknologi yang paling ...(suara tidak jelas) dalam penggunaan apakah itu *artificial* intelijen maupun *missed in learning*
3. Peningkatan kerja sama nasional dan internasional baik bilateral, regional dan multilateral termasuk dalam hal ini adalah keanggotaan dalam rangka Indonesia menjadi anggota di *financial action task force*. Dapat kami laporkan Bapak-bapak dari Komisi III bahwa memang PPATK pada saat ini memegang kepemimpinan di beberapa lembaga internasional baik regional maupun internasional dan pada saat ini Indonesia sedang berjuang untuk menjadi anggota *financial action task force*. Ini menjadi sangat strategis Bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Untuk negara kita karena ini tidak hanya berimplikasi sebetulnya terhadap kinerja dari pemberantasan dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melainkan ini akan sangat berdampak kepada kredibilitas perekonomian kita secara keseluruhan.
4. Pelaksanaan riset dan pengembangan.
5. Peningkatan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan nanti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini akan dipergunakan oleh semua stakeholder kita termasuk dari semua Aparat Penegak Hukum yang akan memanfaatkan *training center* kita yang cukup luas juga di daerah Cimanggis.
6. Terkait dengan proses reorganisasi PPATK, dapat kami laporkan bahwa pada saat ini kami sedang dalam proses untuk melakukan reorganisasi dan kami juga berencana esok hari akan bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk membicarakan secara lebih detail rencana reorganisasi kita yang kami anggap sangat mendesak mengingat kita harus lebih responsif dan lebih efektif di dalam menangani berbagai tindak pidana pencucian uang yang semakin berkembang dan *spetigated*.
7. Terkait dengan peningkatan kompetensi SDM PPATK. Sebagaimana Bapak-bapak ketahui tentu saja bahwa bekerja di Lembaga Intelijen Keuangan seperti PPATK sangat membutuhkan keahlian-keahlian khusus yang terkait dengan berbagai bidang dan ini dari waktu ke waktu selalu menuntut perubahan yang signifikan.

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas tentang pagu anggaran Kementerian dan Lembaga dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2021. Bahwa pagu anggaran belanja PPATK tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 224,6 miliar untuk membiayai dua program:

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp186,1 miliar,
2. Program pencegahan yang terdiri dari program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme sebesar Rp 38,5 miliar.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Upaya PPATK untuk mendapatkan persetujuan tambahan anggaran dari pagu indikatif telah kami sampaikan dalam kesempatan RDP namun belum dapat dipenuhi, dikarenakan anggaran pemerintah lebih difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi covid-19. Meskipun kami menyadari sepenuhnya sempitnya ruang fiskal pemerintah ditahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp 224,6 miliar tersebut diperkirakan akan sulit mendukung kinerja dalam mengemban tugas dan fungsi PPATK secara optimal. Dalam kondisi ini PPATK telah melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. Melakukan penghematan belanja tahun 2020 dengan harapan dapat memajukan pengadaan beberapa kebutuhan barang modal tahun 2021 di tahun ini,
2. Melakukan penajaman prioritas dan menggeser beberapa kegiatan yang memungkinkan dijadwalkan kembali ditahun 2022,
3. Melakukan pengetatan dan penghematan pembiayaan seluruh kegiatan dengan semaksimal mungkin tidak melakukan pengurangan target pencapaian kinerja dan *ouput*,

Namun demikian penetapan biaya non operasional tahun 2021 pada program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebesar Rp 38,5 miliar atau turun sebesar Rp 30,3 miliar 44% dari tahun 2020 akan menyulitkan kami dalam memenuhi tuntutan kinerja utama yang diharapkan. Berkenaan dengan hal tersebut PPATK mengusulkan pergeseran anggaran antar program serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp 14,9 miliar sehingga pagu PPATK menjadi Rp 239,5 miliar melalui mekanisme penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2021 yang merupakan kewenangan Bapak dan ibu dalam rapat Badan Anggaran DPR RI. Penambahan ini akan kami pergunakan untuk:

1. Penguatan kualitas sistem teknologi informasi PPATK,
2. Pengelolaan bidang hukum untuk penyusunan RUU Perampasan Aset. Pemberian keterangan ahli tindak pidana pencucian uang dipersidangan dan penyusunan amandemen Perpres Reorganisasi PPATK,
3. Peningkatan fungsi Pusdiklat apu PPT dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan apu PPT kepada pihak pelapor dan Aparat Penegak Hukum,
4. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk mendukung *fleksibel working space*,

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati,

PPATK senantiasa berkomitmen untuk mengelola APBN dengan akutable, efektif, efisien dan ekonomis yang tercermin dari pertama pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK RI selama sebanyak 14 kali berturut-turut sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Dapat kami laporkan pula bahwa daya serap anggaran yang relatif tinggi yaitu realisasi anggaran tahun 2019 mencapai 92,54% dan capaian kinerja sebesar 103,53%. Kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang

baik tersebut tentu tidak terlepas dari kerja sama dan bimbingan dari Pimpinan dan seluruh Komisi III DPR RI.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III atas segala dukungan yang telah diberikan kepada PPATK selama ini. Demikian kami sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak dan ibu sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dian Ediana.
Selanjutnya kami persilakan Pak Hasto.

KETUA LPSK (HASTO ATMOJO SURYO):

Terima kasih Pak.

Yang terhormat Ketua Komisi III DPR RI dan para Wakil Ketua Komisi III DPR RI serta para Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Kepala BNPT, Ketua Komnas HAM, Kepala PPATK dan Kepala BNN,
Serta hadirin sekalian yang saya sangat hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat beliau kita diberikan kesehatan ditengah pandemi Covid-19 yang sedang marak pada saat ini.

Saya minta izin untuk bisa menyampaikan bahwa LPSK minggu yang lalu meliburkan kantor karena kami sedang melakukan tes swab pada tanggal 3 September yang lalu dan hasil yang kami dapatkan ada 10 atau 11 staf kami positif tes swab dan dalam kesempatan ini secara khusus kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada Komjen Heru Winarko selaku Kepala BNN, yang memfasilitasi LPSK untuk melakukan isolasi pada staf yang positif tersebut di lido.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Saya akan langsung pada anggaran tahun 2021, sebagaimana disampaikan oleh Pak Pimpinan rapat tadi. Berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S692/MK.02/2020 B636/M.PPN/D8/KU.01.01/08/2020 pada 5 Agustus perihal pagu anggaran Kementerian Lembaga dan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2021. LPSK mendapatkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 79.417.515.000. Nilai tersebut kami nilai belum dapat mengakomodasikan kebutuhan anggaran

untuk pembayaran kompensasi korban tindak pidana terorisme masa lalu sebesar Rp 77.895.000.000. Ini anggaran sebesar Rp 77 miliar ini berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S775/MK.02/2020 6 September 2020 tentang Satuan biaya masukan lainnya untuk penghitungan kompensasi dan bantuan kematian korban terorisme masa lalu dan masa kini. Anggaran tahun 2021 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program kegiatan LPSK dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan saksi dan korban dengan rincian sebagai berikut:

1. Program teknis yaitu anggaran penegakan pelayanan hukum dengan satu kegiatan yaitu perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dengan dukungan anggaran sebesar Rp 29.740.090.000, yang terdiri atas 3 kegiatan utama yakni:
 - a) Penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan saksi dan korban sebesar Rp 7.492.000.000.
 - b) Perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban sebesar Rp 20.624.690.000 dan,
 - c) Penyusunan peraturan bantuan hukum kerja sama kehumasan dan penelitian sebesar Rp 1.623.400.000.
2. Program dukungan manajemen dengan satu kegiatan yakni pengelolaan anggaran sumber daya manusia, sarana prasarana dan tata usaha dengan dukungan anggaran sebesar Rp 8.120.425.000, yang terdiri atas 5 kegiatan yakni:
 - a) Perencanaan keuangan dan pelaporan sebesar Rp 1.659.000.000.
 - b) Rumah tangga kepegawaian teknologi informasi dan pendidikan pelatihan sebesar Rp 1.932.760.000.
 - c) Tata usaha persuratan dan protokol dan dukungan kegiatan Pimpinan sebesar Rp 3.084.065.000.
 - d) Pengawasan internal sebesar Rp 600.000.000.
 - e) Pengadaan sarana dan prasarana kantor perwakilan LPSK di Yogyakarta dan di Medan sebesar Rp 836.600.000. Ini kami sampaikan bahwa LPSK saat ini sudah mempunyai kantor perwakilan di Yogya dan di Medan, yang pada saat ini masih memerlukan pembenahan kantor maupun pengadaan alat-alat kantor.
3. Operasional perkantoran yang meliputi:
 - a) Gaji dan tunjangan sebesar Rp 16.983.000.000.
 - b) Operasional kantor sebesar Rp 24.582.000.000.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang sangat kami hormati,
Serta hadirin sekalian,

Sehubungan dengan jumlah pagu anggaran yang berdasarkan perhitungan kami tidak mencukupi kebutuhan anggaran LPSK pada tahun 2021. Kami sampaikan pula LPSK telah mengajukan usulan inisiatif baru penambahan pagu anggaran tahun 2021 kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas sebesar Rp 129.104.361.900. Ini berbeda dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan rapat usulan inisiatif baru

yang tadi disebutkan Rp 83 miliar ternyata kami merasakan itu masih kurang karena adanya:

1. Usulan kebutuhan pemberian kompensasi kepada korban terorisme masa lalu sebesar Rp 77.895.000.000 dengan keluarnya SBML dari Kementerian Keuangan. Jadi ini termasuk penambahan inisiatif baru yang susulkan. Anggaran sebesar Rp 77.895.000.000 ini kami sediakan untuk pembayaran kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme dimasa lalu yang kami perkirakan sejumlah 1355 orang korban,
2. Usulan kebutuhan anggaran layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi korban tindak pidana sebesar Rp 26.340.230.000.
3. Usulan kebutuhan anggaran dukungan manajemen sebagai dukungan LPSK untuk menjadi bagian anggaran sendiri sebesar Rp 9.485.307.000,
4. Usulan kebutuhan anggaran belanja modal dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana kantor LPSK dan perwakilan yakni kantor perwakilan Yogyakarta dan Sumatera Utara di Medan dan satu pos dari kantor perwakilan di Sumatera ini yaitu di Bangka Belitung atau Pangkal Pinang. Ketiga tempat ini kita perkirakan memerlukan anggaran Rp 12.289.600.000,
5. Usulan kebutuha anggaran dalam rangka Indonesia menjadi kohos dari penyelenggaraan europol network meeting off (...) protection sebesar Rp 3.090.224.900 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2021,

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,
Serta hadirin sekalian,

Sebagai informasi seiring dengan disahkannya Perpres Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK. LPSK sudah memenuhi syarat untuk menjadi bagian anggaran mandiri. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S1056/AG/2020 tanggal 29 Juni 2020 LPSK memperoleh kode bagian anggaran yaitu kode BA123 dan menjadi mitra penuh dari Komisi III DPR RI yang tahap selanjutnya LPSK sedang melaksanakan proses likuidasi baik aset maupun SDM dari Sekretariat Negara sehingga menjadi bagian anggaran yang mandiri pada tahun 2021 yang akan datang. Untuk itu dukungan dari Bapak/Ibu Pimpinan beserta Anggota Komisi III sangat kami harapkan untuk dapat mendukung LPSK dalam meningkatkan kinerja dan layanannya dimasa-masa yang akan datang.

Demikian pengantar kami untuk menjadi bahan diskusi di dalam rapat dengar pendapat pada pagi hari ini. Terakhir,

Wabillahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hasto.

Selanjutnya kami persilakan Komnas HAM.

KETUA KOMNAS HAM (AHMAD TAUFAN):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III,
Juga Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang saya banggakan,
Rekan-rekan dari Pimpinan BNPT, BNN, PPATK dan LPSK,
Beserta seluruh hadirin,

Saya akan memulai saja dari isu strategis Komnas HAM. Perlu kami sampaikan bahwa Komnas HAM baru meluncurkan satu renstra yang terbaru untuk tahun 2020 – 2024 dan dalam renstra itu ada 7 isu strategis yang kami sepakati untuk menjadi perhatian atau fokus Komnas HAM untuk sampai tahun 2024 yang akan datang. Yang pertama adalah pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria dan memang ini kasusnya terus meningkat terutama dengan pertanahan, pertambangan dan juga ada kaitan dengan infrastruktur. Kerja sama kami dengan Kementerian ATR-BPN dengan Kementerian KLHK sekarang kita juga coba untuk menjalin kerja sama dengan Kementerian BUMN karena sebagian juga dengan BUMN. Kemudian adalah pelanggaran HAM yang berat. Ini sedang diskusikan terus tentang upaya kita untuk mencari solusi yudisial maupun non yudisial. Untuk non yudisial bersama dengan KKR sedang terus ada diskusi antara Komnas HAM dengan Kemenko Polhukam.

Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya soal intoleransi ekstremisme Pak yang terus berkembang juga sering kali malah terkait dengan pendirian rumah ibadah misalnya. Kebebasan berpendapat berekspresi dan bersikat kemudian kekerasan aparat dan kelompok masyarakat. Jadi bukan hanya dari aparat tetapi juga dari kelompok masyarakat juga meningkat kasus-kasusnya. Yang berikut adalah akses atas keadilan dan yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah penataan Kelembagaan Komnas HAM itu. Dari renstra itu saya kira saya langsung saja masuk ke rencana kerja dan anggaran Komnas HAM tahun 2021, sebagaimana tadi Bapak Pimpinan berikan arahan. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Keuangan dan Bappenas tanggal 5 Agustus 2020 total pagu anggaran tahun anggaran 2021 Komnas HAM itu Rp 100.231.120.000 yang itu terdiri dari dua:

1. Rp 77.491.135.000 itu untuk Komnas HAM,
2. Rp 22.739.985.000 itu untuk Komnas Perempuan, karena sampai hari ini Komnas Perempuan satkernya masih di Komnas HAM. Mereka sedang berupaya dan kita sudah berikan dukungan juga bagi Komnas Perempuan untuk bisa menjadi satker mandiri sehingga mereka bisa mengembangkan Kelembagaan mereka lebih dari apa yang sekarang.

Anggaran-anggaran sekarang yang tadi tahun 2021 yang sudah disampaikan dalam surat edaran itu, itu meliputi penguatan (...) HAM

masyarakat dan Aparatur Negara Rp 5 miliar lebih, penyelesaian kasus pelanggaran HAM Rp 9,5 miliar lebih, peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan kerja sama Rp 4 miliar lebih dan penyelenggaraan layanan perkantoran, kepegawaian, keuangan, Perundang-Undangan dan bantuan hukum itu Rp 58 miliar. Anggaran kepegawaian kami memang meningkat karena tahun lalu kami menerima 120an PNS yang baru *insya Allah* juga pada tahun ini kami akan mendapatkan 15 lagi tambahan pegawai baru khususnya untuk Sekretariat. Nah kaitan dengan rencana kebutuhan anggaran yang belum teralokasi tahun anggaran 2021 mungkin ini perlu sekaligus saya mengklarifikasi karena tadi malam sebelum ini kami sampaikan bahan terakhirnya.

Kami menyampaikan pada saudara Setjen karena ada pertemuan kami beberapa waktu yang lalu dengan Mensetneg Pak terkait dengan perbaikan gedung waktu itu. Dalam pengajuan kami dua tahun terakhir tahun 2019 – 2020 itu ada Rp 361 miliar yang kami ajukan tambahan tetapi kemudian dalam perbincangan kami virtual dengan Pak Mensetneg saya di dampingi Pak Wakil Ketua Komnas HAM ...(suara tidak jelas), ada tawaran dari Mensetneg untuk kita tidak melakukan renovasi gedung Pak tetapi Mensetneg akan berupaya untuk mencarikan gedung lain. Jadi dengan itu kami tarik Pak yang usulan untuk yang Rp 361 miliar itu.

Nah, kemudian yang kami ajukan sekarang sebagai tambahan anggaran mohon maaf ini tadi baru tadi malam kita revisi Pak karena memang baru kami informasikan hasil kami dengan Mensetneg. Jadi perbaikan gedung Komnas HAM itu di Menteng memang sudah ada banyak hal yang gedung tua Pak ya karena itu perlu diperbaiki beberapa hal disitu tetapi juga tidak kalah pentingnya gedung kami satu lagi kami punya gedung satu lagi di Hayam Wuruk itu lantai 16, 17, 18.

Untuk yang di Hayam Wuruk sebetulnya ini lebih kepada penambahan mebeler Pak karena terutama lantai 18 itu-itu kosong Pak sedangkan kami sudah berkali-kali juga diperingatkan oleh BPK RI untuk mengoptimisasi. Jadi kebutuhannya tadinya karena kita melayangkan Gedung Menteng itu kita rombak kemudian negosiasi dengan Mensetneg ditawarkan nanti dicarikan gedung lain maka perbaikan ini yang kami maksud adalah perbaikan gedung yang ada di Menteng dan penambahan mebeler serta juga internet yang di Hayam Wuruk totalnya Rp 5,5 miliar.

Kemudian soal sistem pengolahan data HAM terpadu. Ini terkait nanti juga dengan perpustakaan Komnas HAM yang sekarang banyak diminati tetapi tentu saja punya keterbatasan kami selama ini untuk melayani publik itu terutama rekan-rekan mahasiswa misalnya yang banyak sekali melakukan kajian penyelesaian skripsi S1, S2 bahkan S3 datang ke Komnas HAM maka kita juga kaitan dengan pengelolaan data ini kita ingin tingkatkan. Kemudian yang berikut sekitar Rp 4,3 miliar itu di untuk surplus di era *flexible working arrangement Pak*.

Kami punya 6 (enam) kantor perwakilan dan sebagian besar program kami biasanya adalah kami kunjungan lapangan karena ada kasus-kasus

begitu. Sekarang kami batasi dan karena itu kami ingin mencoba satu cara baru yang menyelesaikan kasus-kasus dengan cara virtual. Ada banyak kasus yang bisa kami selesaikan kemarin dengan Provinsi Sumsel misalnya kita belasan kasus kita diskusikan secara virtual. Karena itu memang baik kantor yang di Jakarta maupun 6 (enam) kantor perwakilan ini perlu peningkatan sarana prasarannya. Kemudian yang berikut 5,8 miliar lebih itu peningkatan peran Komnas HAM di level internasional.

Saya ingin sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Komnas HAM adalah pendiri dan anggota sekaligus sekarang ini Ketua Pak sampai akhir tahun nanti untuk CNF ...(suara tidak jelas) Asia untuk nasional *human right forum* tahun depan Malaysia yang akan jadi Ketua tetapi kantor Sekretariat permanennya itu di kantor Komnas Pak, kalau pun sekarang ini masih kita urus dengan rapat intercam yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri dan Setneg untuk perizinan dan segala macam yang terkait dengan permanen Sekretariat itu.

Kita juga pendiri dari Asia Pacific Forum dan anggota tentu saja. Di dalam dua forum ini kami banyak melakukan berbagai kegiatan dengan Malaysia, Filipin dan lain-lain karena itu kita ingin tambahkan. Sebetulnya ini sudah pernah kami diskusikan dengan Menteri Bappenas yang lalu termasuk untuk nanti mengupayakan satu konferensi internasional mengenai *islam and human rights*. Jadi kalau dulu Indonesia dikenal dengan Bali demokrasi forumnya di zaman Pak SBY, banyak negara-negara terutama dari negara-negara Timur Tengah mendorong supaya Indonesia juga mengajukan suatu gagasan mengenai *islam and human rights* sehingga kemudian masyarakat terutama umat muslim di dunia tidak lagi mengkontradiksikan antara isu hak asasi manusia dengan *human rights* dan itu bagian dari kita mengambil peran kita. Kemudian ada beberapa isu yang sudah mulai kita itu terkait dengan Rohingya juga walaupun kita selalu posisinya adalah membantu Kementerian Luar Negeri.

Ditingkat yang lebih tinggi di *global alliance national human rights forum* itu GANHRI di Jenewa Pak kita anggota akreditasi kita A dan kita sekarang mendapat peran yang besar untuk menjadi vocal ...(suara tidak jelas) di isu ...(suara tidak jelas) Indonesia atau Komnas HAM yang menjadi *vocal pointnya*. Karena itu peningkatan Komnas HAM di level internasional ini juga kami tambahkan termasuk yang sudah kami sepakati dengan Kementerian Luar Negeri yaitu melakukan *human rights update*. Semestinya bulan Maret yang lalu tim kita berangkat untuk memberikan *human rights update* kepada diplomat-diplomat kita yang akan dikumpulkan oleh Kementerian Luar Negeri di Jenewa tetapi karena Covid tempo hari semua dibatalkan Pak. Insya Allah mungkin tahun depan kita akan coba lagi atau mungkin menggunakan metode yang lain.

Nah, yang terakhir adalah terkait dengan penyelesaian konflik agraria tadi, itu tambahannya kita ajukan sekedar Rp 2,5 miliar. Jadi total kebutuhan tambahan anggaran Rp 22.800.000.000, inilah yang perbaruan dari yang tadi sempat dibacakan yaitu sekitar 600an Pak, tadi sudah kami tarik usulan kami mengenai renovasi kantor itu karena sudah dinegosiasikan dengan Pak

Mensetneg. Beliau akan mengupayakan untuk mencari gedung pemerintah yang lain saja begitu, jadi tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan anggaran dengan merombak kantor Komnas HAM yang ada sekarang yang memang dengan jumlah pegawai kami total 400 orang itu jauh dari cukup Pak apalagi dalam suasana Covid ini. Saya kira demikian

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III yang saya hormati,

Kami sangat mengharapkan kerja sama dukungan dari Bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan isu hak asasi manusia dan Komnas HAM bisa semakin maju ditengah-tengah dinamika republik kita yang juga semakin berkembang dari hari demi hari.

Wabillahi taufik hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasan para mitra kerja.
Sebelum kita lanjutkan kita sepakati dulu waktu untuk kita tambah. Kita tambah setengah jam ya sampai jam 12.00 WIB ya.
Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik kita lanjutkan kepada kawan-kawan Anggota Komisi III untuk memberikan pertanyaan atau penjelasan.
Silakan Mas Rano silakan Kapoksi dulu.

F.PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Para mitra Komisi yang saya hormati disini lengkap ada Pak Kepala BNPT, Kepala BNN, Komnas HAM, LPSK maupun dari LPSK ya yang saya hormati,

Yang pertama Pimpinan izin saya dari pembahasan dari Komnas HAM dulu. Pertama prinsipnya bahwa kami Fraksi PKB kalau melihat anggaran Komnas HAM juga tidak terlalu besar, prinsipnya kita akan dukung hanya ada sedikit catatan Pak Kepala. Yang menarik memang sebetulnya saya prinsipnya mendukung sekali terkait tentang tambahan anggaran ini, terutama saya soroti tentang anggaran Komnas HAM terkait penanganan konflik agraria. Ini kan nilainya Rp 2,5 miliar ya Pak harusnya ditambah Pak, karena banyaki sekali persoalan konflik agraria ini di Indonesia. Dapil saya pun lagi ramai Pak kemarin saya baru menangani ada masalah pembebasan tol yang memang di duga ada pelanggaran HAM disana. Nah ini hal-hal seperti ini memang masyarakat butuh kehadiran bapak. Jadi memang menurut saya Komnas HAM ini akan sangat mempunyai manfaat saat seperti itu Pak. Jadi saya prinsipnya Fraksi PKB tidak keberatanlah dan mendukung untuk usulan

bapak. Catatannya hanya untuk memperjuangkan terkait persoalan konflik agraria itu, karena banyak diluar masyarakat menjerit Pak itu yang pertama.

Yang kedua saya akan ke PPATK Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak Kepala PPATK paparannya cukup jelas konprehensif, bahan yang diberikan juga sangat bagus, runut *infut* dan *outfutnya* prioritas nasionalnya juga sangat bagus dan kembali lagi prinsipnya kami Fraksi PKB pasti mendukung terkait tambahan anggaran maupun anggaran yang sudah ada ini. Karena menurut saya hari ini PPATK sangat penting perannya terutama terhadap tingkat kejahatan yang berkaitan kejahatan perbankan Pak, TPPU dan lain-lain. Kemarin kita sempat rapat soal Jiwasraya dan lain-lain. Jadi peran PPATK harus diperkuat jadi Fraksi PKB mendukung Pak.

Yang ketiga ini terkait BNN. BNN kami juga prinsipnya tidak keberatan dan mendukung Pak Kepala. Hanya tolong persoalan tentang pencegahan nah ini anggarannya nanti tolong dilihat. Yang kedua memang kedepan itu kan akan dikedepankan untuk sebetulnya tidak perlu adanya penahanan terhadap pemakai itu loh. Karena sekarang ini kan kita melihat LP-LP sudah penuh. Ini harus peran BNN kemarin sudah kita rapat dengan Pak Wakapolri kemarin juga terkait anggaran narkoba. Nah target mereka juga tidak perlu melakukan tindakan tetapi harus ada kerja sama yang solid terkait asesmen itu. Makanya saya minta itu anggaran-anggaran disitu diperkuat Pak Kepala jadi tidak perlulah hari ini pemakai malah seolah-olah menjadi masuk ke LP malah semakin banyak dia menjadi bandar nantinya.

Yang keempat terkait dengan terorisme ini BNPT. Tidak apa-apalah ini harusnya anggarannya ditambah juga oke ini. Ini hari ini memang apalagi kemarin ada kejadian juga itu yang nanti apakah itu masih bagian dari persoalan terorisme atau tidak yang penusukan tentang salah satu ulama. Nah ini memang anggaran dari BNPT ini harus diperkuat dan kami Fraksi PKB setuju Pak. Kita akan dukung setiap permohonan yang Bapak lakukan kepada kami. Nah terkait tentang LPSK juga sama prinsipnya kita dukung Pak ini penting juga tetapi disini memang ada saya melihat ada anggaran yang terkait tentang sama-sama penanganan korban terorisme. Jadi harusnya kedepan ini juga yang lain karena memang LPSK juga sangat penting perannya.

Terima kasih Pimpinan prinsipnya kami Fraksi PKB mendukung dan menyetujui setiap pengajuan anggaran yang dilakukan oleh mitra kita semua.
Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Selanjutnya Mas Santoso silakan.

F.PD (H. SANTOSO, S.H.):

Terima kasih Pimpinan dan para Kepala Badan yang hadir pada kesempatan sing hari ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Hadirin yang saya hormati,

Menyimak apa yang disampaikan oleh para Pimpinan Badan yang menjadi mitra Komisi III ini saya menilainya memang sebenarnya apa yang diusulkan anggarannya kecil ya dibandingkan dengan APBN yang ada dan Kementerian atau Lembaga yang lain. Namun memang kita harus memaklumi bahwa negara kita ini orientasinya kan masih soal perut, pendidikan dan kesehatan. Jadi yang menjadi pokok dari tugas bapak-bapak yang sebenarnya juga menunjang keberhasilan dan ketertiban negara ini memang kurang mendapatkan perhatian begitu. Namun saya lebih suka lebih baik menyalakan lilin dari pada menutup kegelapan begitu Pak. Jadi apa pun yang menjadi program yang dianggarkan oleh bapak-bapak meskipun tidak dipenuhi ya tetap saya yakin ada semangat di dalam dada bapak-bapak sekalian. BNN saya melihatnya ini naiknya kecil ditahun 2020 Rp 1,63 triliun, kemudian ditahun 2021 hanya Rp 1,68 triliun sehingga naiknya ini hanya 1 koma sekian triliun. Sebenarnya kalau dilihat secara rasional Kementerian Keuangan dan Bappenas ini tidak melihat juga dalam sisi penganggaran maupun *urgency* peran yang harus dilakukan oleh BNN dalam rangka melakukan pemberantasan narkoba ini.

Jadi menurut saya apa yang diusulkan nanti tambahan itu karena ini menjadi prioritas kita untuk melawan narkoba menjadi musuh bersama harus kita laksanakan. Saya ingin mengkritisi Pak tentang program Bapak itu Pak ya bidang pencegahan dan pemberantasan. Ingin tahu Pak ada tidak si program itu dilapas-lapas Pak, karena lapas ini sekarang menjadi pusat peredaran yang tidak teradar itu tetapi sebenarnya itu sangat rawan. Kemudian yang berikutnya saya ingin juga program Bapak ingin tahu Pak atau saya menyarankan agar program di SMP dan SMU sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill dalam rangka pengetahuan penanggulangan narkoba ini Pak saya berharap jangan, titiknya memang sedikit Pak ya hanya 34 sekolah diseluruh Indonesia padahal sekolah kan banyak ya cuma sekali lagi karena keterbatasan dana Pimpinan saya ingin supaya sekolah-sekolah yang menjadi program Bapak nanti jangan sekolah bonafit Pak percuma itu itu hanya memberikan garam dilautan. Harus diberikan kepada sekolah-sekolah yang *midle* kebawah. Kalau perlu sekolah-sekolah yang memang tingkat rawannya terhadap penyalahgunaan narkoba itu ada itu.

Kemudian yang berikutnya Pak ini Lembaga rehab yang memenuhi standar pelayanan minimal 20 SPM ya (Standar Pelayanan Minimal) Bapak hanya programkan dapat dana Rp 3,3 miliar ini riskan sementara orang yang direhab itu mungkin ribuan begitu Pak ya. Saya hanya ingin tanya dari dana sekecil itu apakah mampu melakukan perubahan, kalau peningkatan saya

kira masih 10 tahun lagi Pak tetapi paling tidak mungkin kita mendapatkan gambaran dari program itu Pak. Yang berikutnya tentang program Bapak untuk tema tematik terintegrasi tanaman ganja siap musnah. Ini banyak ini Pak sepektakuler ini 10 miliar begitu. Cuma mungkin saya ingin tahu programnya bentuknya apa si Pak. Padahal kalau kita tahu ladang ganja kan biasanya hanya di daerah Sumatera begitu ya. Apakah sebesar ini juga tersebar di daerah-daerah lain. Kemudian BNPT, BNPT kalau tadi BNN cuma 1 koma sekian persen kalau bicara presentase masih mendingan Pak naik 8% ya dari tahun 2020 begitu. Cuma memang sekali lagi saya juga menilainya Pimpinan ini juga sangat kecil Indonesia yang memiliki kerentanan untuk timbulnya terorisme ini penanganannya sangat kecil. Kita tahu Inggris saja yang sudah menjadi negara maju rakyatnya sejahtera itu yang namanya ira itu ya Irlandia Utara yang melakukan kegiatan-kegiatan terorisme juga sangat luar biasa padahal itu negara maju. Belum lagi ada di Spanyol di Eropa saja begitu, apalagi di Indonesia yang memiliki kerentanan ini kenaikannya menurut saya sangat kecil begitu. Saya ingin tahu Pak karena cukup besar ini untuk program forum komunikasi pencegahan terorisme Pak itu organisasinya sampai kemana Pak apakah efektif begitu.

Kemudian bentuk program kegiatan kontra radikalisme juga ya. Itu yang ingin kita tahu Pak. Untuk usulan penambahan ya menurut saya sekali lagi Pimpinan karena ini sangat kecil terkait dengan persoalan bangsa untuk menciptakan ketertiban di NKRI ini menurut saya sangat rasional apa yang menjadi usulan dari BNPT. Perlu kita ketahui bahwa anggaran ini setelah saya hitung dari 515 koma sekian miliar itu operasionalnya hanya Rp 172 miliar Pimpinan hanya 30% Pak ya, sisanya adalah kegiatan dukungan dan untuk gaji dan lain sebagainya begitu. Jadi karena sangat kecil seperti ini maka menurut saya anggaran yang diusulkan dalam rangka penambahan kegiatan-kegiatan BNPT perlu kita dukung. Kemudian untuk PPATK Pak tadi disebutkan PPATK bahwa dalam rangka pencegahan TPPU dan PT itu ya pendanaan terorisme saya ingin tahu programnya apa yang Bapak melibatkan unsur BNN disitu ada ya termasuk unsur BNPT. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri akhirnya tidak ketemu begitu. Nah usulan tambahan ini juga menurut saya sangat realistis harus kita dukung Pak.

Yang berikutnya LPSK. Pak programnya menurut saya termasuk termasuk Komnas HAM ya ini juga cukup bagus dan menurut saya juga perlu kita dukung tidak terlalu banyak itu dan hal ini perlu kita lakukan dalam rangka optimalisasi peran dan tugas yang mereka lakukan dalam rangka menciptakan setabilitas negara ini. Menurut saya itu Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Santoso.

Silakan selanjutnya Pak Wihadi dibelakang.

F.P-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pak Ketua Komisi III dan Anggota Komisi III dan juga,
Yang terhormat Kepala BNN, Kepala BNPT, Ketua Komnas HAM, Kepala PPATK dan Kepala LPSK beserta jajaran semuanya,

Saya mempelajari satu persatu dari apa yang sudah disampaikan dari Lembaga-Lembaga pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian kita semua dan juga menjadi suatu keprihatinan kita semua terhadap anggaran-anggaran yang sudah diberikan menjadi pagu anggaran pada anggaran tahun 2021. Pertama kepada BNN, Pak Kepala BNN anggarannya kan Rp 1,6 triliun jadi disini kalau saya melihat dibidang rehabilitasi itu hanya 102 dan dipencegahan 68. Yang ingin garis bawahi disini Pak masalah rehabilitasi seharusnya rehabilitasi ini menjadi fokus kita kedepan karena kalau melihat dari over kapasitas yang ada dalam lapas-lapas itu-adalah semuanya dari narkoba hampir kurang lebih 70% dari beberapa kali kita melakukan kunjungan setiap lapas. Pertanyaannya adalah kenapa mereka itu tetap dilapas bahkan dalam lapas sering kali kita juga temukan dari pengedar keluar dari lapas, dari pemakai keluar dari lapas mereka jadi pengedar.

Artinya bahwa lapas bukanlah tempat untuk dikatakan sebagai pemberantasan narkoba secara benar tetapi kita ingin adanya satu rehabilitasi sehingga mereka ini benar-benar mereka sembuh dan kalau kita melihat disini dari anggaran rehabilitasi ini perlu adanya suatu penambahan. Karena bagaimana pun juga dari orang-orang yang terkena permasalahan narkoba yang ada dilapas itu seharusnya mereka itu lebih baik direhabilitasi. Negara pun juga tidak dirugikan kalau itu rehabilitasi, karena anggaran rehabilitasi itu kemarin waktu kami sempat bicara dengan Pak Kepala kan satu orang 20 juta, 20 juta Pak ya 20 juta. 20 juta satu orang selama 4 bulan atau 6 bulan. Bayangkan kalau yang namanya pecandu narkoba itu masuk ke lapas yang mereka divonis sampai 5 tahun 6 tahun. Berapa biaya negara dalam anggaran untuk satu orang yang hidup dilapas yang memakan anggaran kita semuanya dan membuat over kapasitas lapas. Ini perlu ada pemikiran kedepannya sehingga pemberantasan narkoba saya kira BNN dan pihak Kepolisian ini mesti harus ada sinergi dan apabila diperlukan juga pencandu-pencandu narkoba itu yang ada dilapas itu direhabilitasi.

Yang memungkinkan mereka direhabilitasi sehingga over kapasitas lapas itu juga bisa mereka berkurang. Jadi tidak seperti kemarin dikeluarkan begitu saja tetapi ada rehablitasinya. Saya kira itu menjadi suatu poin yang mungkin rehabilitasi itu juga bisa menjadi suatu fokus kita bersama. Kemudian masalah pencegahan dan masyarakat BNN. Jadi permasalahan ini Pak sering kali BNN melakukan sosialisasi. Nah sosialiasi-sosialisasi itu sebenarnya bisa kita kerja samakan dengan Anggota Komisi III Pak. Karena Anggota Komisi III ini dari bermacam-macam dapil tentunya juga mempunyai kosituen dimana dapil-dapilnya juga banyak sekolah-sekolah. Saya kira program-program dari pada BNN itu bisa disinergikan dengan kami sebagai

Anggota Komisi III. Kami membantu sehingga kami sendiri pun di dalam dapil kami sendiri pun juga kita bisa memberikan suatu kontribusi untuk peredaran narkoba ini menjadi tidak begitu saja bebas begitu tetapi kami juga bisa mengawasi nah salah satunya juga dengan program-program yang BNN bisa lakukan dengan kami sebagai mitranya.

Jadi itu dua hal itu Pak yang menjadi perhatian kita semua bahwa mengenai masalah rehabilitasi itu dan bila perlu rehabilitasi yang ada itu tempat-tempat rehabilitasinya juga tentu diperbanyak Pak karena rehabilitasi ini mungkin hanya beberapa tempat dan ini juga masih banyak yang bekerja sama dengan rumah sakit rumah sakit. Jadi saya harapkan juga anggaran kedepannya fokusnya kalau nanti ada penambahan Pak fokus rehabilitasi Pak itu menjadi tujuan kita semuanya. Kemudian untuk BNPT tadi disampaikan di BNPT ini ada silfa sampai Rp 127 miliar. Ini saya sebenarnya sisa anggaran itu Rp 127 miliar mungkin karena Kepala BNPT-Nya sudah berganti Pak karena Kepala BNPT yang dulu itu kan jalan-jalan ke luar negeri terus. Nah saya harapkan juga yang sekarang ini Kepala BNPT yang sekarang ini seperlunya saja kalau ke luar negeri. Karena yang kemarin ke luar negeri terus jadi anggarannya itu mungkin habis karena dipakai itu begitu.

KETUA RAPAT:

Kemarin covid Pak, sekarang covid kemarin tidak.

F.P-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):

Karena mungkin sekarang covid jadi tidak bisa ke luar negeri. Jadi makanya anggarannya itu tersisa. Jadi saya harapkan Pak memang ini anggaran dari BNPT ini sebenarnya kalau 515 itu sebenarnya juga suatu anggaran yang pas-pasan dan saya kira sebenarnya kurang kalau kita melihat. Karena BNPT ini kedepannya menjadi lider dari pada Undang-Undang Pemberantasan Teroris Pak. Jadi seharusnya memang harusnya lidang sektor dari pada pemberantasan terorisme ada di BNPT sesuai dengan Undang-Undang Anti Terorisme yang kita sudah kita sudah sahkan periode yang lalu. Nah dalam hal ini, perlu juga sama sebenarnya kasusnya dengan BNN mengenai masalah sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan mengenai masalah terorisme itu. Bisa juga melibatkan kami sebagai Anggota Komisi III di masing-masing dapilnya.

Jadi jangan seakan-akan kita ini yang memberi anggaran tetapi kita tidak tahu anggaran itu dipakai untuk sosialisasi kemana begitu kan padahal kita ini sebenarnya juga mempunyai konstituen, kita mempunyai daerah dapilnya yang mereka sebenarnya membutuhkan itu juga. Kalau misalnya ada sosialisasi dapil itu ya melibatkanlah kita ini sebagai Anggota DPR RI Komisi III sebagai mitranya BNPT dan BNN untuk bisa sama-sama melakukan sosialisasi. Jadi itu menjadi suatu hal yang mungkin bisa kita sama-sama kita jalankan Pak. Nah kalau ke luar negeri mau sama-sama dengan Komisi III juga bisa juga Pak jadi anggarannya kan sama soalnya itu Pak. Jadi hal-hal itu saja yang menjadi perhatian dari pada BNPT dan BNN. Kemudian saya yang agak kaget LPSK Pak kenapa anggarannya bisa turun

sedemikian rupa cuma Rp 79 miliar begitu, ya Pak betul ya Rp 79 miliar. Saya tidak tahu Pak dengan Rp 79 miliar ini Bapak bisa *running* kantor atau tidak, bisa melindungi saksi-saksi atau tidak begitu.

Nah ini suatu hal yang memang kami dalam hal ini mendorong memang harus ada suatu penambahan di LPSK. Jadi nanti dalam hal ini juga kami ingin dorong LPSK jangan Rp 79 miliar. Kalau saya melihat program-programnya seperti itu ini jangan-jangan cuma program yang diberikan kepada kami saja nanti tidak bisa jalan semua karena ini anggarannya tidak ada begitu kan tidak mencukupi begitu. Nah ini saya harapkan kita semua nanti kita dorong LPSK ini anggarannya jangan Rp 79 miliar. Dari kemarin yang diajukan Rp 300 miliar lebih, yang disetujui 79 miliar saya harapkan bisa ditambah.

Kemudian untuk PPATK saya kira PPATK mempunyai peranan yang penting dan memang ini kerjanya lebih ke ...(suara tidak jelas) jadi saya kira apa yang sudah disampaikan cukup baik Pak. Jadi kita dengan anggaran-anggaran seperti itu kita ada keberatan dan memang kalau memang misalnya ada yang memang orang masih belum tahu juga PPATK. Itu. Program sosialisasi PPATK itu perlu juga Pak.

Jadi karena masyarakat itu juga tidak tahu PPATK itu seperti apa. Banyak yang tidak tahu Pak ...(suara tidak jelas) PPATK dan bagaimana orang itu bisa tahu bahwa yang namanya lalu lintas uang itu juga diawasi kemudain juga terorisme dan narkoba semuanya. Kalau masyarakat semua tahu masalah PPATK maka mereka tentunya bisa memanfaatkan PPATK ini untuk melaporkan beberapa hal yang bisa mungkin diterima oleh PPATK.

Nah kemudian untuk Komnas HAM, ini sebenarnya saya tidak mau bisa berkomentar banyak masalah Komnas HAM Pak, karena Komnas HAM dirapat evaluasi yang lalu ini dipertanyakan Komnas HAM itu Lembaga Pemerintah atau LSM begitu. Jadi karena saya melihat beberapa hal yang tadi disampaikan Bapak tadi mengenai masalah prestasi-prestasi luar negeri yang sepertinya Bapak dengan kebanggaan tersendiri, jangan-jangan ini adalah Bapak menjadi *good boy* untuk dunia luar tetapi justru menginjak masyarakat sendiri begitu tidak memperhatikan masyarakat kita sendiri. Kalau seperti itu buat apa kita memberikan anggaran yang banyak kepada Komnas HAM.

Nah salah satunya hal juga bagaimana mungkin yang namanya Komnas HAM mengkritisi lembaga pemerintah yang lain, mengkritisi tugas dari pada DPR RI itu sendiri. DPR RI itu tugasnya membuat undang-undang kenapa Komnas HAM menyampuri DPR RI dalam membuat undang-undang. Ini suatu hal yang sebenarnya kami tidak bisa melihat bahwa Komnas HAM ini sebenarnya membela kepada siapa begitu kan. Saya kira untuk Komnas HAM saya pikir saya tidak berkomentar banyak, anggarannya mau disetujui tidak disetujui itu nanti terserah dari pada fraksi-fraksi yang lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Wihadi.
Pak Arteria dulu ya duluan tadi, silakan Pak Arteria.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Sebentar.
Sebelum mulai kita perpanjang dulu waktu ya. kita perpanjang 30 menit lagi sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pertama kami ke BNN Pak Ketua. Ini BNN serapan anggarannya masih 54%, ini serapannya termasuk rendah atau apa nanti tolong dijawab Pak Kepala. Kemudian pagu anggaran tahun 2021 ini untuk P4GN-nya Rp 525 miliar ya, kemudian dukungan manajemennya Rp 1,1 triliun. Ini memperlihatkan bahwa yang namanya darurat narkoba ini bohong-bohongan Pak. Kita tidak serius anggarannya cuma segini dan kemudian BNN cuma dapatnya Rp 525 miliar. Baru satu kali transaksi narkoba itu Pak segitu Pak. Transaksi narkoba itu sehari mungkin ada ribuan transaksi. Jadi mungkin labanya bandar satu hari ini untuk kerja-kerja BNN satu tahun. Makanya BNN itu selalu menjadi pelengkap penderita menjadi tukang sapu yang baik karena memang pasukannya betul-betul pasukan merah putih yang disana Pak. Polisi-Polisi yang ditaruh itu juga kasihan juga ini Pak yang sudah tidak *demandnya* ditaruhi disana. Saya juga minta kita ya tidak mungkin ini bagaimana kita perang terhadap narkoba dengan postur anggaran yang seperti ini. Padahal ini sudah saya di Komisi III sudah berapa tahun ini sekian kali setiap ini kita teriak tetapi dapatnya juga segini. Nanti dibandingin Pak Kepala sama dikumpulin itu di Polda seluruh Polda *plus* anggaran Polri terkait dengan masalah bicara narkoba ini.

Kemudian yang berikut dengan anggaran yang sedikit Pak Kepala Mas Heru ini kami juga mohon untuk kerja-kerjanya bisa lebih efektif lagi Pak. Seperti dibidang pencegahan, pencegahan dikasih dana cuma Rp 68 miliar ya Pak ya, apa yang mau kita lakukan Rp 68 miliar. Nanti BNN kerja-kerjanya seminar-seminar disalahin lagi. Ya kalau tidak seminar-seminar apalagi yang bisa Pak Hinca. Kerja-kerja pencegahan yang begitu mendalam ya tidak mungkin dilaksanakan. Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat Rp 72 miliar. Pemberantasannya sendiri hanya Rp 270 miliar Pak ini yang sudah saya katakan menyedihkan ini. Pertanyaan saya apakah bisa ini Pak dengan angka yang 525 ini dikalkulasi lagi sehingga nanti bisa lebih cantik lagi.

Karena mengganggu yang 1,1 ini pun juga agak susah kecuali ada Pusat Laboratorium Narkotika dan pengembangan SDM BNN-nya agak diganggu. Kalau ini diganggu juga kasihan nanti Pak Kepala juga tidak ada vitamin.

Berikutnya mengenai anggaran proyek prioritas Pak. Desa yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga dari dana desa atau desa bersih narkoba. Kebetulan di Jawa Timur Pak saya punya Pak Kapolda ini lumayan bagus dulu namanya kita punya Kampung Taguh Semeru. Nah itu semuanya sampai ke RT/RW kita punya data Pak mencari orang itu gampang ini makanya ini pintar Kapoldanya. Nah Kampung Tangguh Semeru itu bisa kita pakai untuk misalnya untuk terorism Pak Boy untuk masalah narkoba. Ini bisa kita pakai untuk semua desa Pak bahkan ditempat saya saya ingin semuanya Kampung Tangguh desanya itu. Nanti tidak usah juga pakai dana dari sini kita bisa numpang BNN sama BNPT di Kampung Tangguh yang pakai Pemerintah Desa anggarannya Pak.

Kemudian kawasan rawan tanaman terlarang, 4 (empat) kawasan itu dimana saja Pak. Karena kemarin Menteri Pertanian bilang ganja boleh Pak saya juga minta tanggapan sama Bapak ini kalau ganja boleh Pak jangan-jangan Pak Hinca kebunnya banyak itu diatas sana kan. Takutnya dibuat kebun ganja lagi lebih untung katanya Pak Hinca. Nah ini juga terkait dengan poin 11 di halaman 9-nya Bapak peta tematik terintegrasi lahan tanaman ganja siap musnah.

Jangan sampai nanti teman-teman berpikir anggaran ini beririsan semua Pak tabrakan semua. Sudahlah vendornya nanti satu kerjanya juga cuma satu kerjaan ini tetapi dibagi menjadi beberapa kerjaan. Berikutnya mengenai peta dasar daerah penyelundupan narkoba dan precursor narkotika dari luar negeri. Intinya si kita tidak apa-apa kita ada dana-dana seperti ini tetapi kan kalau yang model kaya begini kan kita sudah tahu-tahu semuanya Pak Pantai Timur Sumatera ya kan kalau di Madura kita tahu di Sampang, dari Bali masuknya kemana. Apakah peta dasar ini memang harus dihadirkan terus pakai dananya buat pemberantasan.

Berikutnya juga mengenai ada nomenkatur yang titik lokasi tanaman narkotika yang dimusnahkan, *blue print* informasi jaringan TPPU. Nah ini kan bisa dibicarakan sama teman-teman yang ada di PPATK ini sehingga memang uang yang sedikit itu bisa Bapak pakai ke tempat-tempat yang lain. Ini ada remaja teman sebaya anti narkoba SMP SMU sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill dan sebagainya.

Saya lebih menekankan begini Pak kita harus memainkan dengan akal yang lumayan cerdas dan pintar. Kalau bisa Pak tahun ini semua Kabupaten Kota harus ada Perda P4GN-Nya. Bapak tidak usah mengerluarkan uang nanti Pemerintah Daerah yang kerja Pak. Semuanya itu Pak Bapak dirikan semua kantor-kantor BNNK kalau bisa dibiayai oleh Kabupaten Kota. Mumpung mau Pilkada Kepala Daerah yang tidak mendukung BNN berarti tidak peduli sama narkoba jualannya begitu dong Pak. Ada 270 Kabupaten Kota ini Pak Bapak tawarkan programnya. Pasangan calon ada mau pakai ini kalau tidak anda tidak mendukung program kami. Nah saya kasih contoh

ditempat saya Pak sampai saat ini Kabupaten Kediri Pak ini Perda P4GN belum ada kalau bisa bulan ini Bapak bisa turun kesana ya. Kita ke Kediri untuk kita pus bagaimana Perda P4GN ini hadir. Kenapa, karena ini sudah punya BNN Kabupaten disitu Pak. Kasihan dia kalau tidak dibantu sama Pemerintah Kabupaten tidak jalan Pak. Saya bisa bandingkan dengan di Tulung Agung Bupatiya bagus jalan. Kota Kediri Bupatiya bagus ini kalau di kotanya jalan, P4GN-Nya ada Pak ini nanti minta tolong kalau ada timnya bapak.

Kemudian juga bagaimana penguatan-penguatan BNN ini di dapil Pak. Kalau saya kebetulan Anggota yang peduli sama narkoba pemberantasan. Kalau bisa ada orangnya Bapak yang bisa dampingi kami. Setiap kami turun Pak adain kita adain kegiatan. Berikutnya juga dengan kerja sama dengan negara-negara lain. Kita tidak bisa memberantas narkoba sendiri Pak. Ini kejahatan trans nasional. Kalau Bapak sendiri Bapak nanti menjadi tukang sapu yang baik Pak. Saya terkait dengan hal-hal ini hanya kasih masukan saja bagaimana BNN bisa lebih hebat lagilah. Saya kalau bicara BNN pastinya kan saya dengan duka Pak. Selalu saya melihat teman-teman ini kerjanya luar biasa merah putihnya sudah kelihatan sangat. Terkait dengan pagu anggaran terkait dengan usulan tambahan BNN PDI-Perjuangan pada prinsipnya menyetujui Pak Kepala.

Untuk BNPT terima kasih Pak Boy paparannya bagus. Pak Boy ada dua lagi yang satu yang tertulis, yang satu untuk versinya dipaparkan secara slide atau power point. Kami juga minta betul kalau bisa semua paparan mitra ini seperti paparannya Pak Boy. Kenapa dijelaskan kami ini Lembaga Negara visi misi nawacitanya apa. Ini kan jelas perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Dimasukin lagi kami ini adalah BNPT masukin ke visinya lagi memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman pidana terorisme. Jadi kelihatan Pak hadirnya uang negara bayar mesin ini dipakainya buat apa, nanti teman-teman di mitra kami yang lain kalau bisa seperti itu. Kami mohon ini Pak Boy ini tantangan juga bagi semua Anggota Komisi III ini.

Pak Boy sudah memaparkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang serius. Dengan segala keterangannya ini sayangnya tidak pakai halaman ini, halaman dua atau halaman berapa ini, halaman dua. Saya katakan Pak Boy yang ini kalau dari definisi ini kejahatan terhadap Pak Wiranto itu teroris juga ya Pak Boy ya. Kejahatan terhadap Habib ulama-ulama kita juga kejahatan teroris juga Pak Boy. Nah, kami mohon juga kita juga dilakukan titik tekan yang baru ini kebetulan Ketuanya baru dan kami menaruh harapan sama Pak Boy karena Bapak ini kan memang pelaku utama Pak. Pengalamannya luar biasa ini bom Bali ini aktornya beliau Pak yang ungkap Pak asal Bapak-bapak tahu Pak Pak Boy ini. Jadi memang sudah khatamlah di dunia terorisme kami juga mohon di..

Berikutnya Pak Pasal 43G Undang-Undang Teroris yang direvisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadikan BNPT ini menjadi kordinator Pak. Mengkordinasi antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme. Program pemulihan korban nanti sama LPSK juga tetapi saya tidak

melihat ini anggaran yang dikasih makanya kan tidak sinkron antara kebijakan politik hukumnya negara sama yang ada di Kementerian Keuangan. Anggarannya ternyata sama sudah menjadi kordinator. Kewenangannya ditambah, tugasnya ditambah, kerjaannya lebih melimpah anggarannya sama. Nanti tolong BNPT juga menghadirkan bahwa kami ini berubah dari mobilnya avanza sekarang sudah menjadi ...(suara tidak jelas) yang *full option* begitu loh. Mahal Pak bensinnya biaya perawatannya juga beda Pak ko dihargai sama ini takutnya ditengah jalan tidak jalan Pak. Nah, kami mohon sekali bagaimana program-program yang disampaikan.

Kalau saya melihat Pak ini adalah semacam perspektif negara terkait dengan penanggulangan terorism. Pak Boy ini harus disampaikan ke Pak Jokowi Pak paparannya bagus ini Pak yang Bapak sampaikan ini Pak. Bagaimana pengelolaan kebijakan penanggulangan terorisme secara optimal kemudian kegiatannya apa sudah dijabarkan. Pelaksanaan kerja sama internasional secara optimal bahkan sudah ada target sasaran dan yang ditujunya seperti apa. Berikutnya kesiap siagaan nasional, ini yang kita katakan kita tidak hanya menjadi tukang sapu yang baik Pak. Kita jangan sampai mencurigai ke warga kita sendiri Pak. Wah yang celana cingkrang teroris kalau ada program kesiapsiagaan nasional kita tahu ko tetangga kita yang mana yang nakal, yang yang mana yang teroris, yang mana yang apa. Berikutnya juga ini saya kosentrasi disiapsiagaan pemetaan wilayah rawan paham radikalism. Sekarang ini radikalismnya tidak berbasiskan agama lagi Pak, suku Pak Boy ngeri loh suku itu loh.

Kemudian juga bagaimana juga antisipasi tindak pidana teroris terhadap Aparat Penegak Hukum. Ini nomenkaltur anggarannya sudah Pak Boy sampaikan. Terkait pelaksanaan kontra radikalisasi. Ini juga terima kasih ini Pak ini kami dijabarkan yang secara lebih terinci kontra radikalisasi atau sekmentasi, kemudian teknologi medsos dan sebagainya sampai juga dengan *human information intelligence* Pak ini yang saya katakan ini bisa disinergikan dengan Kampung Tangguh.

Berikutnya mengenai derad Pak, derad secara optimal. Bapak ini deradikalisasi ini memantau betul Pak kebetulan ada satu tempat di tempat saya yang ada di Lamongan Pak, ya itu bagus Pak tetapi apa iya seperti itu. Nanti didiskusikan sama Pak Hasto ini Pak Pak Hasto ini juga kalau untuk masalah ...(suara tidak jelas) dia paham sekali ini. Apakah memang begitu Pak atau memang kita lebih di hulunya lagi. Orang tidak boleh miskin, orang kalau tidak ada orang miskin mudah-mudahan tidak ada terorism, karena salah satu ya 60% orang teror itu karena mereka bisa diperdayakan. Nanti tolong ini kalau bisa ada kajian khusus kami senanglah.

Ini paparannya bagi saya ini sudah indah sekali ini. Berikutnya juga penanggulangan terorism yang ...(suara tidak jelas) respon dan sebagainya. Nah saya ingin sampaikan Pak, ada tugas BNPT melakukan reformasi kelembagaan pasca Pak revisi Undang-Undang Terorisme. Ini diseriusi Pak Boy nanti biar BNPT-nya gagah sekali ini. Pasti nya pasukan-pasukan Bapak nanti akan bangga sekali ini. Zamanya Bapak sejarah kelembagaan BNPT ini dihasilkan begitu loh jadi Bapak penoreh sejarah. Memang kalau dilihat

dari anggaran kita sedih sekali Pak karena memang dilihat anggaran kita bicara anggaran lama saja ya sedikit sekali tetapi kan katanya Pak Ketua tidak perlu anggaran tahun 2020 ya Pak Ketua ya, kita ke tahun 2021. Saya mau kasih contoh anggaran tahun 2021-nya harusnya bagus tetapi ini pun juga dikurangi Pak berkurang anggarannya. Saya kasih contoh anggaran 515 memang program tambah menjadi program penanggulangan sama dukungan manajemen tetapi sama sekali tidak berpengaruh Pak sama nanti ongkos buat bekerja. Kenapa, di nomenklatur 5096 bidang penanggulangan terorism pencegahan, perlindungan dan derad.

Anggarannya Rp 158 miliar ini anggarannya turun Pak Pak Boy. Anggaran tahun 2020-nya Rp 188 miliar. Kan bagaimana ya kita yang kewenangannya ditambah malah anggarannya kurang ini. Ini padahal ini dagingnya Pak penanggulangan terorism di bidang pencegahan. Penanggulangan terorism di bidang penindakan ini juga turun Pak Rp 137 miliar semulanya Rp 162 miliar Pak. Berikutnya juga bidang kerja sama internasional okelah yang seperti ini, tetapi kalau kita melihat ini Bapak bisa dibuat tidak berdaya kalau Bapak tidak begitu cerdas untuk memainkan peran dengan anggaran yang sangat sedikit ini Pak.

Mengenai *output* prioritas nasional nomenklatur 5096 dulu ini Pak ya. Derad terhadap masyarakat terpapar ini cuma Rp 49 miliar Pak. Kalau kita melihat masyarakat terpapar saya tidak tahu kemarin Pak Tito itu pernah kasih paparan ya masyarakat kita yang terpapar itu jumlahnya sangat besar bahkan katanya sampai di kementerian lembaga dan BUMN katanya begitu saya tidak tahu ya. Kalau anggarannya seperti ini Rp 1,5 miliar per provinsi Pak. Kita mempunyai 514 Kabupaten/Kota jangan-jangan kita mengadakan seminar saja tidak sanggup Pak. Belum lagi melihat bagaimana dampak dari seminar itu Pak.

Ini tolong diseriusi ini teman Pak Komisi III ini. Kegiatan kontra radikalisme juga begitu. FKPT ini cuma 32 memang FKPT memang kesannya sederhana Pak Boy tetapi saya itu pernah mendapat program dari Bapak FKPT itu bagus sekali kalau memang kita bisa kemas dengan baik karena disitu isinya tokoh-tokoh semua tetapi kalau anggarannya seperti ini ya sedikit sekalilah ini. Saya meminta betul yakini kita semua untuk membantu BNPT ini untuk melakukan penguatan sehingga memang negara tidak salah dan disalahkan khususnya BNPT dibidang lemah nantinya. Terkait dengan anggaran paparan dari BNPT kami bisa memahami PDI-Perjuangan mendukung pagu anggaran termasuk juga usulan tambahan anggaran sebesar 304 yang belum teralokasi ini Pak Rp 304 miliar.

Berikutnya PPATK, PPATK paparannya sudah diketik begini bagus ini Pak PPATK ini. Duitnya tidak ada tetapi paparannya bagus. Visi PPATK kemudian dikaitkan dengan misi PPATK sangat baik dipaparkan tetapi saya mau ingin sampaikan Pak. Stabilitas ekonomi integritas sistem keuangan itu akan beririsan dengan bagaimana penegakan sistem yang bebas korupsi.

Kadang-kadang kalau kita terlalu ketat pun ekonominya juga tidak begitu baik tetapi itu kita katakan mudah-mudahan PPATK pastinya bisa lebih

memahami itu. Arah kebijakan sepenuhnya kami sepakat Pak tetapi memang ada beberapa hal yang ingin coba kita cermati. Anggarannya sekarang 211 ya Pak ya. ini anggaran dibandingin mitra-mitra yang lain yang mendapatkan kenaikan lumayan ini adalah PPATK. Kami mohon sekali terkait dengan fokus rencana kerja. Ini implementasi Go AML ini maksudnya nanti tolong dijelasin ya Pak ya, kemudian juga terkait dengan peningkatan kualitas TI, kerja sama internasional dan sebagainya. Kami ingin sampaikan kalau Bapak pastinya sudah paham tetapi kalau untuk yang ada di dalam PPATK. Kita disuruh transparan sama dunia lain Pak sama Amerika, sama AMF, sama *World Bank* Pak. Bagus katanya ini kan namanya tujuan-tujuan demokratisasi HAM dan semuanya indah-indah semua tetapi jangan sampai nanti akan menyandera republik kita sendiri Pak. Makanya jadilah PPATK yang berkeindonesiaan, mudah-mudahan saya selalu mengingatkan begitu Pak.

Bukannya saya tidak sepakat saya tidak sepakat Anggota DPR RI, Pemerintah, TNI, Polri Bapak cek, cek, cek bukannya saya menolak tetapi ada hal yang lebih parah lagi Pak bagaimana korporasi-korporasi asing itu Pak. DPR RI Bapak mau *check trashing* uangnya paling dapat Rp 100 miliar paling dapat Rp 1 triliun tetapi korporasi-korporasi asing atas nama rekayasa financial dan skema-skema ekonomi ini Pak merampoknya lebih besar Pak tetapi kan selama ini mudah-mudahan kalau zamannya Bapak dan sebelumnya juga sangat baik itu ya disosor itu. Yang lebih rendahnya lagi yang disosor apa, bandar judi, pres itu bandar narkoba tetapi janganlah pejabat-pejabat publik kita Pak. Kasihan Pak pejabat publik kita ini orang yang sudah terseleksi Pak di komunitasnya dari partai politik diseleksi, dari pemerintahan diseleksi. Kalau itu pun masih ada kesalahan bukan saya minta ditoleransi tetapi saya pikir kita harus lebih arif dan lebih bijaksana. Banyak hal yang harus bisa kita kerjakan.

Mengenai pagu yang tadi kami ingin sampaikan PPATK dapat tambahannya besar tetapi saya melihat Pak program pencegahan dan pemberantasannya hanya Rp 38 miliar dari 224 itu Pak. Ini yang betul-betul Bapak harus bekerja tetapi ongkosnya sangat sedikit. Jadi hampir 80% ya Pak ya dipakai untuk dukungan manajemen Pak. Kalau bisa nanti bisa direformula lagi sehingga PPATK itu bisa lebih berjaya lagi.

Berikutnya pada halaman 20 Pak terkait dengan pencegahan pemberantasan pengelolaan bidang hukum. Ini ada Undang-Undang ini Undang-Undangnya apa saja ya Pak ya, ada satu Perpres, ada 15 peraturan, kemudian perkaranya badan usaha satu perkara tetapi orang perorangan 120 perkara. Dibalik Pak badan usahanya yang 120, orang perorangannya satulah yang memang betul-betul dia konyol dan nakal sekali transaksi keuangannya Pak. Jadi kalau orang itu tidak begitu banyak Pak. Mengenai usulan tambahan pada prinsipnya kita bisa terima Pak tetapi yang saya cuma menyarankan yang tadi Pak yang dagingnya cuma 20%. Kedua, usulan tambahan Bapak ini 38 sekian ini tetapi yang dipakai untuk penguatan dagingnya tidak ada Pak.

Saya kasih contoh usulan tambahan untuk penguatan kualitas teknologi informasi, pengelolaan bidang hukum, peningkatan fungsi pusdiklat

bukan yang masalah ke pencegahan dan kaya tadilah. Mudah-mudahan tetapi pada prinsipnya Pak Kepala kita mendukung dan kami menyetujui pagu anggaran dan usulan tambahan PPATK sehingga PPATK bisa nyaman bekerja untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETUA RAPAT:

Pak Arteria saya ingatkan waktu, silakan singkat saja.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya ini kan semakin banyaknya data kan kita semakin banyak ngomongnya Ketua. Terima kasih Ketua.

Mengenai LPSK, LPSK mendapatkan pagu anggaran kemarin 79, 79 ini diluar kewajibannya LPSK ini-ini mohon Pak Ketua nanti tolong. Kita punya kewajiban berdasarkan Undang-Undang baru Pak LPSK ini wajib membayar kompensasi ya Pak ya. Pembayaran tindak pidana terorisme masa lalu, waktu kita bahas revisi Undang-Undang Terorism waktu kita bicara LPSK juga. Ini kita punya komitmen ini untuk menyelesaikan terkait pembayaran kompensasi tindak pidana terorisme tetapi sudah berapa periode ya sampai sekarang belum dikabuli juga Pak. Kami mohon kalau bisa nanti Komisi III ini juga betul-betul bersurat kepada Banggar Besar untuk memastikan bagaimana kewajiban negara ini yang disampaikan melalui Komisi III ini bisa betul-betul diperjuangkan. Mengenai rencana kerja LPSK saya katakan LPSK ini, nah sekarang mohon maaf Pak Kepala ini makanya LPSK yang sekarang top kreatif. Jadi postur anggarannya tidak seperti yang kemarin lebih indahlah lebih bagus. Ini posturnya ada 29, ada 8 dan untuk belanja operasional belanja tetapnya Rp 40 miliar. Kami mohon Pak LPSK Pak Kepala Mas Hasto bagaimana pemberian kompensasi ini nanti Mas bisa bicara lagi dengan Pak Kepala Ketua yang baru ini Pak mudah-mudahan bisa diperjuangkan ya mengenai kompensasi yang tadi.

Begitu juga rehab psiko sosial Pak, kemudian fasilitas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan penyusunan Perpres tentang Saksi Pelaku. Bagi Komisi III mengenai justice kolaborator, mengenai ...(suara tidak jelas) itu Pak ini merupakan isu serius. Jadi kalau boleh LPSK bisa melibatkan kita, waktu itu kan kemarin sempat kita diskusi ya Pak ya mengenai itu kalau bisa ini memang betul-betul dipertajam sebelum KUHP sebelum RKUHP-nya dibahas lagi Pak Ikhsan. Jadi nanti bisa *compatible* Pak bisa *match* nanti dia dengan rumusan norma yang ada di kitab dasar yang ada di KUHP nanti Pak.

Mengeni usulan inisiatif pada prinsipnya kita bisa memahami Pak khususnya terkait dengan penguatan layanan bantuan medis dan sikologis bagi kejahatan. Sebagaimana terdampak Perpres 82 dan kemudian usulan terkait dengan kompensasi korban terorism. Pada prinsipnya PDI-Perjuangan memahami menyetujui termasuk pagu maupun usulan tambahan dari LPSK. Ini perubahannya mendasar Pak terima kasih ini Pak Setjen juga ya paparan

tahun hari ini sama tahun kemarin berbeda kalau kaya begini kan kita senang melihatnya Pak ada perubahan.

Mengenai Komnas HAM sedikit Pak Kepala ini saya minta Pak Komnas HAM Bapak menjelaskan dulu sikap genit Komnas HAM. Kita tidak boleh menjadi genit-genit Pak kalau Bapak genit-genit Bapak berhenti saja begitu Pak. Apalagi ini sudah mengganggu kewenangan konstitusionalitas DPR RI. Tugas kami ini membuat Undang-Undang bersama pemerintah. Bapak tidak boleh menghasut apalagi menjadi provokator. Minta DPR RI menghentikan membahas Rancangan Undang-Undang Bapak ini siapa. Kalau kita mau melihat apa si yang dikerjakan Komnas HAM bagi republik. Coba Bapak tulis saja prestasi Bapak prestasi Komnas HAM pada tahun ini apa. Kalau kita mau bongkar-bongkar saya akan bongkar Pak. Bapak ini hanya mencari pekerjaan di republik ini Pak. Anggaran Bapak ini 90% buat belanja-belanja pegawai buat kerja-kerjanya tidak ada. Saya mau kasih gambaran ini Pak apa yang Bapak kerjakan pelanggaran HAM terkait dengan konflik agraria mana si BK itu BK mana BK, BK ulung itu. Datang ke Belitar apa yang dia bisa selesaikan di Belitar.

Saya dapil Belitar Pak jagoan saya nyelesain tidak pakai anggaran Pak saya kasih contoh ini. Pelanggaran HAM berat apa yang kalian kerjakan selain membuat kegaduhan dengan Kejaksaan Agung. Intoleransi ekstrimisme dengan kekerasan mana ada. Bagaimana pendirian gereja, pendirian rumah-rumah ibadah di daerah-daerah mayoritas. Begitu juga dengan pendirian masjid, orang mau sholat di beberapa tempat tertentu apa hadir Komnas HAM? Tidak ada. Bagi saya itu gampang urusan masalah suku sentimen suku hadir Komnas HAM? Satu kalimat pun tidak pernah ada. Kalian hadir ditengah-tengah isu populer. Bentuk apa bentuk asing yang begini. Jangan bicara HAM kalau tidak mengerti Pancasila dan NKRI Pak. Berikutnya saya ingin sampaikan mengenai masalah yang saya katakan tadi,. Bapak bilang membentuk gugus tugas Covid. Ngapain Komnas HAM bentuk covid nanti kena covid ongkosnya mahal tidak bisa bayar lagi. Tidak ada ini kita yang fokus-fokus saja Pak. Saya kasih contoh Pak Rp 100 miliar negara bayar Bapak tetapi program pemajuan dan penegakan HAM hanya 25%, 74-Nya apa, buat bayar gaji.

Pantesan saja jadi harapan pemajuan HAM dan sebagainya tidak akan bisa tercapai. Karena apa, tidak ada patriot-patriot yang hadir disitu semuanya orang-orang yang ingin populer. Jadi jangan kritisi DPR RI Pak DPR RI itu sangat menghormati Kelembagaan ...(suara tidak jelas) DPR RI kita bongkar ini boroknya Bapak kayak apa, yang betul-betul dagingnya Pak. Penanganan pelanggaran HAM berat itu hanya Rp 2,1 miliar dari total Rp 100 miliar anggaran bapak. Tidak ada, 2,1 dapat duitnya Rp 100 miliar apa yang mau diharapkan. Berikutnya lagi usulan penambahan pagu anggaran Rp 22 miliar, yang mana untuk penguatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak ada Pak. Yang ada dipakai Bapak buat apa, renovasi revitalisasi gedung, pengolahan data, peningkatan peran Komnas HAM, level internasional ini jalan-jalan dan sebagainya. Jadi begini loh saya katakan jangan kaya malaikatlah saya bongkar benar habis ini punya bapak. Sekali lagi tolong

jaga kehormatan antar Lembaga. Bapak ini bukan LSM Bapak ini juga tidak bersih-bersih sekali dibandingin kita-kita yang ada di DPR RI Pak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Arteria.

Yang terakhir mungkin Pak Taufik Basari singkat ya.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Pimpinan sebelah kiri juga belum.

KETUA RAPAT:

Tetapi sudah terwakili saya pikir.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Saya kira belum Pimpinan kami mau bicara.

KETUA RAPAT:

Oke sebentar kita perpanjang waktu 30 menit lagi ya.
Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Singkat ya Pak Taufik ya.

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., Shum., LL.M.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Saya menyadari waktu yang sangat singkat karena itu saya akan perpadat. Yang pertama-tama terkait dengan BNN, tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan-rekan saya soal bagaimana kita mestinya memberikan suatu prioritas terhadap persoalan rehabilitasi. Karena ini kan kita tetap harus mengedepankan redaksion. Percuma saja kita melakukan penegakan hukum pemberantasan tetapi kemudian kita tidak menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena. Samalah seperti covid ini kalau misalnya kita biarkan orang terjangkiti tanpa kita berupaya untuk menyembuhkan dan dia jalan kemana-mana orang ikut juga terjangkit sama juga. Kalau dipemberantasan narkoba ini kan juga begitu kalau kita tidak melakukan penyembuhan terhadap orang-orang yang sudah terkena. Oleh karena itulah maka terkait dengan anggaran yang diajukan ini saya melihat masih belum tergambar bahwa rehabilitasi terhadap pengguna menjadi suatu hal yang

sangat-sangat prioritas dalam hal strategi pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh BNN.

Kita bisa melihat misalnya dalam anggaran proyek prioritas nasional tahun 2021 yang diajukan ini. Disini misalnya ada soal Lembaga Rehabilitasi Narkoba ya memenuhi standar pelayanan minimal itu hanya 20 Lembaga dengan nilai anggaran Rp 3,3 miliar. Menurut saya sangat kecil Pak coba kita harus bisa tambahkan targetnya itu lebih dari 20 Lembaga dan pagu anggarannya pun juga harus kita tingkatkan dan ini juga tidak sebanding misalnya dengan pencegahan dalam bentuk kampanye atau peningkatan kapasitaslah mungkin saya melihat dipoin 14 ini, SMP dan SMU sederajat yang memperoleh pengembangan *soft skill* itu Rp 20 miliar dengan targetnya 34 sekolah. Mungkin hal-hal yang berbentuk kampanye masih bisa kita kurangi Pak. Kampanye nanti kita alokasikan pada rehabilitasi. Kalau pun kampanye tadi misalnya dipoin 13 ini remaja, teman sebaya anti narkoba yang terbentuk ada 1.730 orang dengan jumlah pagu Rp 30 miliar mungkin bisa diperkecil juga, diperbanyak targetnya dengan masing-masing orangnya di anggarannya diperkecil. Jadi targetnya bisa lebih banyak dibandingkan hanya 1.730 orang.

Mungkin bisa 5.000, bisa 4.000 itu lebih baik dibandingkan kita Rp 30 miliar hanya untuk target 1.730 orang. Nah jadi BNN poinnya disitu karena waktu ya sebenarnya banyak hal yang ingin saya tekankan. Yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa menyelaraskan antara keinginan kita semua agar rehabilitasi menjadi hal yang prioritas dengan bagaimana kita mengalokasikan anggaran terhadap rehabilitasi ini. Yang kedua Komnas HAM, saya sedih sebenarnya dengan posisi Komnas HAM dalam konteks kenegaraan kita. Saya dulu membayangkan bahwa Komnas HAM ini kalau punya kewenangan yang bisa diberikan luas dengan perhatian negara terhadap Komnas HAM juga bisa diberikan itu mestinya seperti KPK juga bayangan saya seperti itu tetapi sayang sekali memang perhatian negara terhadap Komnas HAM ini menurut saya masih sebelah mata tetapi itu juga tantangan bagi Komnas HAM saat ini untuk bisa menunjukkan bahwa ini Komnas HAM lembaga negara loh. Kita posisinya harusnya bisa saling bekerja sama dan berkordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Oleh karena itulah maka terkait dengan anggaran yang diajukan.

Sepertinya saya ada titik tekan juga terkait dengan bagaimana kerja sama antara Komnas HAM dengan lembaga-lembaga terkait dengan pihak Kepolisian, termasuk juga dengan BNPT, dengan BNN, dengan LPSK mungkin sudah sering ada komunikasi tetapi paling tidak dengan Kepolisian, dengan Kejaksaan, dengan Aparat Penegak Hukumlah, dengan BNN, dengan BNPT. Dalam rangka apa, dalam rangka memberikan masukan-masukan dan melakukan satu kesepakatan bagaimana setiap tindakan-tindakan Aparat Penegak Hukum atau Institusi Penegak Hukum ini punya perspektif HAM. Nah oleh karena itulah harus tergambar di anggaran ini, harus ada komunikasi Pak, Pak Taufan dan Pak Amir di belakang tidak kelihatan bewoknya karena tertutup dengan masker. Jadi bayangan saya satu rekomenda satu surat keluar dari Komnas HAM ketika itu kemudian dikomunikasikan dengan Pak Kapolri misalnya, Pak Kapolri sudah bisa

langsung oke kita menghargai punya penghargaan terhadap produk dari Komnas HAM. Lantas dia mungkin telfon Kapolda "Pak Kapol ini ada rekomendasi dari Komnas HAM terhadap misalnya tindak penyiksaan di terjadi di Polres A begitu" langsung ada tindakan cepat. Itu bisa terjadi kenapa kalau ada komunikasi. Oleh karena itulah maka di dalam postur anggaran yang diajukan ini kalau soal kampanye menurut saya masih bisa dilakukan ...(suara tidak jelas) tadi sudah dikritik oleh Bung Arteri tetapi sudah menghilang Bung Arterinya. Karena itu lebih penekanannya adalah koordinasi antar lembaga.

Apa bentuk anggarannya nanti bisa dirumuskan tetapi bayangan saya itulah dia sejajar, bukan sejajar dia saling berkomunikasi sehingga produk Komnas HAM itu benar-benar dihargai dan saya juga ingin negara juga menempatkan Komnas HAM dalam posisi yang penting tidak dipandang sebelah mata seperti yang selama ini terjadi. Jadi itu untuk catatan saya untuk Komnas HAM.

Kemudian yang berikutnya BNPT, terima kasih Pak Boy ini juga sudah sangat baik paling catatan saya hanya pada persoalan anggaran yang ditujukan yang bisa dialokasikan untuk kerja sama dengan Pemerintah-Pemerintah Daerah dalam hal pencegahan. Kalau disini kan kita ada langsung ke masyarakatnya ya, masyarakat yang terpapar tetapi supaya kita juga bisa irit dan juga bisa menggerakkan agar Pemerintahan Kabupaten Kota itu juga bisa melakukan sesuatu untuk melakukan pencegahan terhadap gerakan-gerakan ekstrimis dengan programnya masing-masing disitu itu yang juga mesti ditekankan yang juga coba dirumuskan dalam postur anggaran yang diajukan.

Sama tadi seperti yang tadi saya sampaikan kepada Komnas HAM sebisa mungkin Pemerintah Kabupaten Kota itu juga memiliki perspektif yang sama dalam hal strategi yang dibangun oleh BNPT untuk melawan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme ini. Jadi kita lebih ringan kerjanya lebih pada soal software perspektifnya yang kita tanamkan di tiap-tiap Kabupaten Kota ini tetapi sama juga *software*nya juga dimasukkan ke Aparat Penegak Hukum termasuk juga Kabupaten Kota untuk Komnas HAM untuk saya juga penting tetapi jangan yang ceremony-ceremony juga balik ke Komnas HAM ya yang banyak ceremony penghargaan-penghargaan itu kalau hanya penghargaan saja tanpa ada implementasi juga kurang. Balik lagi ke BNPT jadi catatan saya tidak banyak Pak Boy. Saya juga melihat sudah sangat rasional apa yang dijukan oleh BNPT ini, terima kasih untuk BNPT.

Yang berikutnya PPATK saya juga tidak ada komentar banyak apalagi PPATK memang urusannya urusan hitung menghitung seperti ini ya. Lapornya sudah sangat rapih saya tidak ada catatan silakan bekerja selamat bekerja dan kami bisa menerima semua apa yang diajukan dari Fraksi Partai Nasdem memberikan dukungan penuh.

Terakhir untuk LPSK ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama-tama adalah saya kebetulan juga selain di Komisi III juga di Baleg. Kemarin ketika penyusunan prolegnas saya mengajukan

usulan untuk perubahan terhadap Undang-Undang LPSK. Tadinya yang mau saya ajukan adalah Undang-Undang Rancangan Undang-Undang Sistem dan Bantuan Terhadap Korban Kejahatan kemudian setelah dikaji bisa saja itu masuk bab khusus di dalam perbaikan atau perubahan terhadap Undang-Undang LPSK. Artinya saya butuh masukan ruangnya sudah ada di prolegnas saya ingin ada masukan dari LPSK terkait kira-kira apa yang bisa kita normakan juga di dalam RUU yang sudah ada ruangnya di prolegnas tersebut. Ini juga sudah ada anggarannya saya pikir sudah bisa dilakukan diskusi-diskusi FGD dan sebagainya oleh LPSK.

Kemudian yang berikutnya adalah soal tadi yang soal sudah disampaikan oleh rekan saya Arteria bagaimana kemudian kita bisa melakukan komunikasi terkait dengan anggaran untuk kompensasi atau pun rehabilitasi bagi orang-orang yang memang sudah diberikan kewenangannya atau tugasnya oleh Undang-Undang kepada LPSK.

Baik, secara umum dari seluruh apa yang tadi sudah diajukan Fraksi Partai Nasdem bisa menerima dengan catatan-catatan yang tadi sudah saya sampaikan untuk perbaikan kita semua. Demikian Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Mungkin dari meja Pimpinan dari Fraksi, oke Pak Hinca untuk Fraksi Demokrat tadi sudah diwakili oleh Pak Santoso mungkin. Singkat saja ya waktu kita.

F.PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Terima kasih Pimpinan.

Melengkapi saja tadi yang disampaikan rekan kami dari Fraksi Partai Demokrat karena ini penting sekali. Untuk Komnas HAM saya kira sama dengan teman-teman yang lain tadi saya tidak perlu lagi tambahkan. Sedangkan untuk PPATK satu saja dengan dana Rp 600 juta di halaman 23 itu akan pengelolaan bidang hukum untuk penyusunan RUU Rampasan Aset. Saya mohon tahun ini bisa selesai, itu saja jadi biar langsung saja karena itu sedang kita bahas.

Berikutnya tentang PPATK sedikit saja kami ingin menggaris bawahi juga bahwa tidak ada keadilan yang di dapat diputus oleh meja hakim atau palu hakim tanpa saksi-saksi yang berkualitas. Anda bagaikan malaikat untuk melindungi saksi dan korban itu tetapi dalam keadaannya beberapa tahun sampai hari ini kita bisa bilang LPSK ini malaikat tanpa sayap melindungi tetapi tidak dilindungi dengan anggaran seperti ini. Karena itu karena Bapak sudah menyusun anggaran ini kami ingin mengatakan LPSK harus malaikat dengan sayap melindungi dan dilindungi. Karena itu anggaran yang sudah disampaikan ini dari Fraksi Partai Demokrat kita dukung penuh untuk menjalankan ini.

Kemudian BNPT, BNPT Bang Boy kita diskusi waktu lalu bahwa salah satu poin yang kita harapkan adalah *one map*. *One map* satu peta untuk teroris waktu itu peta itu. Karena itu saya coba cek dari mulai dari 5096 sampai 5099 saya belum melihat ada peta itu peta teroris itu. Karena itu menurut saya dan inilah dasarnya kita bekerja peta internasional, peta nasional, peta provinsi, peta Kabupaten Kota, peta Kecamatan, peta desa kalau itu ada di BNPT saya kira kita mengerti seberapa luas dan apa yang harus kita kerjakan. Saya belum melihat disini dan kalau masih bisa dimasukkan dan ditambahkan Pak Boy tolong ditambahkan supaya tahun ini kita sudah punya peta itu, dengan peta itulah kita menjalankan tugas-tugas kita.

Terakhir BNN ini agak panjang sedikit saja Pimpinan. Kita sepakat dan waktu Presiden Jokowi pertama sekali menjadi Presiden di periode pertama langsung mengungkapkan bahwa Indonesia darurat narkoba. Sampai hari ini belum dicabut status itu dan karena itu berarti status kita darurat narkoba. Berarti BNN menyusun anggaran ini berdasarkan keadaan darurat itu.

Dengan begitu mari kita melihat dari sekian banyak poin-poin ini saya mau mulai dari satu yang pertama saja dulu yaitu darurat karena sudah banyaknya orang masuk dipenjara atas kerja keras Polisi, BNN, Jaksa dan Hakim yang menjarakan pengguna-pengguna itu yang tadi sudah disampaikan teman-teman itu. Akibatnya Rp 1,2 triliun pun habis uang untuk di lapas memberi mereka makan juga. Sekarang teman-teman sudah angkat tadi soal rehabilitasi. Kalau angka rehabilitasi itu Rp 102 miliar tadi kita sebut berapa sekarang yang ada itu pakai dasar apa kita. Sekarang ini 40 sampai 50.000 orang dipenjara karena narkoba itu sebagai pengguna. Jika satu orang itu kita rehabilitasi tadi dananya antara 3 sampai Rp 5 juta atau kita sebutkan Rp 5 juta itu rehabilitasi satu orang itu per 6 bukan berarti Rp 30 juta. Jika sekarang ada 50.000 dibagi dengan *budget* Bapak yang segitu hanya melakukan rehabilitasi 3.412 orang saja. Jadi sepakat dengan teman-teman tadi anggaran ini belum cukup bahkan belum memadai semangat kita merehabilitasi mereka. Nah oleh karena itu harus kita ubah ini catatan saya. Kalau tidak maka pertanyaan-pertanyaan di Komisi III yang selama ini selalu mengatakan BNN ini mau bubar atau sangar? Saya mau milih sangar. Sangar termasuk juga rehabilitasinya untuk mengangkat menuntaskan soal ini. Jadi kalau anggarannya segini cuma 3.400 sekian kalau 50.000 dia berarti butuh 15 tahun kita menyelesaikan ini tidak serius saya sepakat dengan teman-teman tadi.

Komisi III melihat BNN tidak serius mengurus ini begitu rehabilitasi ini, karena hanya begitu anggarannya. Saya kira kami semua sepakat naikan Pak jika dihitung tadi itu jika dihitung tadi angkanya itu hanya 1,2 triliun itu yang dibutuhkan dan saya kira kita sepakat menyetujui itu Pak. Kelolalah uang 1,2 triliun untuk merehabilitasi warga negara saudara-saudara kita korban narkoba itu. Karena itu kalau cuma 4 Pak tidak perlu BNN, karena itu kalau teman-teman marah untuk dibubarkan sepakat tidak serius mengurusnya. Anggaran kan kita sepakati bersama saya mohon Pimpinan kita setuju saja Rp 1,2 triliun untuk rehabilitasi 50.000 korban itu-itulah baru kita pro kepada warga negara yang menjadi korban kejahatan narkoba dunia itu-itulah dari sisi itu

Pak. Kalau boleh masih bisa ditambahkan masih diubah ini Pimpinan saya usul itu Fraksi Demokrat mengusulkan angkanya Rp 1,2 triliun untuk rehabilitasi itu baru serius negara. Yang kedua ini Pak pada beberapa waktu lalu dan tadi sudah ditanyakan sumber memasukan narkoba dari luar itu paling besar kan dari luar negeri bahkan ada yang terbesar itu dari Tiongkok. Bahkan dari pelabuhan-pelabuhan di Malaysia itu yang BNN telah melakukan kerja sama dengan pemimpin-pemimpin top di Malaysia tetapi yang paling banyak memasukannya ke Sumatera Utara Malaysia semua Pak sudah teken-teken itu MoU juga Tiongkok. Pada tahun 2019 yang lalu negara-negara di Asean membentuk satgas jalur pelabuhan Bapak masih ingat itu.

Waktu itu arahnya pembentukan satgas ini adalah mengantisipasi narkotika hasil produksi Tiongkok kalau sekali masuk satu ton satu ton itu Pak. Satgas ini namanya *Asean seaport interdiction task force* dan kita yang ditunjuk sebagai pemimpinnya. Nah, kenapa Pak tidak ada disini padahal kita tahu kitalah pasar dan ancaman terbesar dari mereka itu. Kemarin yang dari Taiwan itu Pak 1 ton Pak masuk ke Jakarta dan seterusnya dan seterusnya. Nah, poin saya adalah kalau seandainya *budget* ini masih bisa Pak untuk pencegahan itu mengapa tidak dimasukan lagi disitu agar kita jaga ini Pak. Karena itu kesimpulannya Pak saya mau BNN sangar, sangar dalam menjaga, sangar dalam merehabilitasi baru kita sepakat ini darurat begitu.

Nah dengan catatan-catatan itu Pimpinan Fraksi Partai Demokrat seperti yang disampaikan juga Pak Santoso dapat memahami dan menyetujui seluruh anggaran yang diajukan oleh teman-teman dari LPSK, PPATK, Komnas HAM, BNPT khusus BNN saya menyarankan untuk anggaran itu ditambah. Kalau masih bisa diperjuangkan saya menyatakan untuk tambahkan angka itu 1,2 triliun untuk rehabilitasi korban-korban narkoba itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Hinca.

Yang terakhir mungkin ada masukan masukan dari Fraksi Golkar silakan.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Mitra Komisi III yang sama-sama saya hormati,

Saya tidak memakan waktu lebih 3 menit ini Pak Pimpinan dan para mitra. Saya hanya mau menegaskan bahwa setelah saya mendengarkan pemaparan mitra kerja kita pada hari ini mulai BNPT, BNN, Komnas HAM, PPATK, LPSK secara seksama saya memperhatikan usulan anggaran dan tambahannya, ada beberapa mitra kita ini yang tergolong kecil sekali sebenarnya permintaannya tetapi saya tidak bisa mencampuri secara kedalam karena yang mengetahui berapa kemampuan, berapa yang ingin dibelanjakan adalah Bapak-bapak semuanya sesuai dengan di wilayahnya

masing-masing. Hanya Fraksi Partai Golkar menekankan kepada kita semuanya secara Kelembagaan bekerja dengan baik jangan ada lagi kecolongan diwilayah kita masing-masing. BNPT tantangannya lebih berat lagi karena baru beberapa hari ini terlihat di daerah mana itu yang ada penikaman Lampung ya.

Ada penikaman atau penusukan pendakwah kita dan saya kira ini adalah patut kita menjalankan intelijen yang lebih kuat. BNN dengan situasi yang saat sekarang ini tentu banyak sekali cara dan pola yang dilakukan oleh para pengedar-pengedar narkoba yang ada diluar memasukan di daerah lapaslah dan lain sebagainya. Menyentuh dunia pendidikan kita mulai dari menengah, atas sampai di perguruan tinggi ini ancaman buat kita semuanya dan saya kira BNN semakin solid untuk menghadapi semua itu, itu harapan dari pada Golkar.

Kemudian Komnas HAM banyak konflik agraria yang betul-betul terjadi diwilayah daerah diseluruh Indonesia ini menjadi harapan dari kita semuanya bahwa Komnas HAM ini kalau saya menghitung-hitung dari 514 Kabupaten Kota taruhlah 200 juta saja kira-kira anggaran satu Kabupaten untuk kita seriusi setiap masalah yang ada disana maka Rp 100 miliar lebih. Sementara anggaran yang Bapak misalnya ajukan ini sangat minim sekali toh juga kurang lebih Rp 100 miliar.

Ini memberikan gambaran bahwa betapa harapan besar yang ada dari masyarakat kepada Bapak tetapi Bapak dengan nafas yang sangat terbatas sekali tentu tidak bisa lagi berbuat yang lebih besar dan kita bisa maklumi sebenarnya tetapi harapan ini Fraksi Partai Golkar kedepan Bapak harus lebih meningkatkan kira-kira anggaran dan kinerja yang memadai. PPATK terima kasih catatan dari Fraksi Partai Golkar silakan bekerja Pak. Itu adalah secara teknis Bapak melakukan semua itu dan tidak ada catatan mendasar dari Fraksi Partai Golkar untuk bapak. Bapak bekerja secara profesional menjaga kebersamaan di dalam. LPSK juga begitu memberikan rasa aman kepada semua perlindungan saksi yang diberikan kepada saksi-saksi dan saya kira ini adalah harapan-harapan dari Partai Golkar. Jangan ada orang yang takut menjadi saksi disetiap dalm pencarian keadilan. Bapak adalah harapan mereka untuk memberikan perlindungannya dan saya kira ini secara keseluruhan saya sampaikan kepada mitra Fraksi Partai Golkar telah mencermati semua usulan dan anggarannya kami menyatakan bahwa menerima semua itu dan tidak menemukan sesuatu yang perlu dikoreksi.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Supriansa.

Kepada para mitra kerja saya persilakan untuk menjawab singkat dan jawaban terkait anggaran saja untuk yang menanya sudah keluar ruangan tidak perlu dijawab Pak. Sebelum Bapak menjawab waktu sekarang jam satu

kurang lima kita perpanjang 15 menit lagi. Sepakat Pak jam 13.15 WIB kita selesai?

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Pak Boy Rafli.

BNPT (Komjen. Pol. Dr. Drs. BOY RAFLI AMAR, M.H.):

Terima kasih Pimpinan atas waktu yang diberikan.

Pertama-tama dari BNPT menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari bapak-bapak yang telah menanggapi penyampaian kami. Tentu dari 6 dan terakhir 7 terakhir dari Bapak Supriansa, dimana masing-masing Fraksi peratama-tama memberikan *support* yang terkait usulan anggaran yang kami sampaikan. Yang kedua tentunya kami melihat ada beberapa saran masukan kepada kami termasuk tentunya berkaitan hal-hal yang terkait peristiwa yang terjadi belakangan ini yang menjadi perhatian dari masyarakat kita. Kami sangat sependapat bahwa upaya-upaya kita untuk terus meningkatkan deteksi dini kepekaan terhadap potensi ancaman yang mengarah radikalisme, intoleran dan radikalisme teror. Berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Lampung yang merupakan penyerangan-penyerangan terhadap ulama yaitu Bapak Syekh Ali Jaber yang terjadi pada hari Minggu pada pukul 17.00 lalu. Kami dari BNPT bersama dengan Aparat Penegak Hukum terkait terus mendalami.

Pertama apakah pelaku terafiliasi dengan kelompok jaringan teror yang ada itu sementara yang terus kita dalami. Yang kedua juga jejak digital dari yang terkait yaitu saudara Alvin Andrian. Sementara dari beberapa saksi yang telah disampaikan atau berhasil kita himpun memang ada informasi yang menyatakan terutama dari pihak lingkungan dan keluarga bahwa yang bersangkutan selama 5 tahun terakhir ini telah mengalami gangguan jiwa. Hal itu juga pernah dibuktikan dengan adanya pemeriksaan di rumah sakit pada tahun 2016 di rumah sakit Kemiling Lampung dan tentunya juga kita tidak percaya begitu saja. Kita telah bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terutama berkaitan dengan masalah apakah yang bersangkutan benar-benar gila atau pura-pura gila ini sedang kita lakukan dengan pemeriksaan psikologi dan psikiatri. Kemudian berkaitan dengan masukan dari Pak Hinca tadi terakhir masalah indeks radikalisme terorisme di Indonesia. Jadi memang di dalam tahun 2016 ini termasuk juga di dalam kebijakan yang ada pada dokumen yang telah kami sampaikan yaitu penanggulangan berbasis kepada penelitian atau *research*. Jadi ini memang tahun 2016 kami bekerja sama dengan Biro Pusat Statistik dan itu nanti bahan untuk melakukan mapping indeks radikalisme di Indonesia utamanya adalah radikalisme intoleran dan radikalisme teror.

Jadi *insya Allah* nanti tahun 2015 ini tahun 2021 kami akan bisa merealisasikan hasil mapping secara keseluruhan. Walaupun nanti tentu ini bisa juga ditambah dengan mapping dari jejak digital dari media sosial ini juga kan rencanakan seperti itu jadi kombinasi antara hasil survei dengan *mapping*

di dunia maya yang kami melihat juga bisa menjadi rujukan di dalam melihat bagaimana demografi akun masyarakat kita berkait dengan masalah terorisme.

Demikian dari kami dan sekali lagi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI BNPT RI mengucapkan terima kasih atas dukungan pada rapat hari ini dan tentu ini dapat memberikan motivasi semangat bagi BNPT untuk terus mengupayakan agar Negara Republik Indonesia terbebaskan dari ancaman terorisme, ancaman radikal intoleran dan radikal teror. Demikian

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih BNPT telah menjelaskan.
Selanjutnya BNN saya persilakan.

KEPALA BNN (Komjen. Pol. Drs. HERU WINARKO, S.H.):

Baik terima kasih atas pertanyaan Anggota Komisi III yang mulia.

Memang disini kita coba rangkum ada 3 poin misalnya disini pertama mengenai rehabilitasi, yang kedua ...(suara tidak jelas), yang ketiga mengenai interdiksi. Untuk *capacity building* perlu saya informasikan ke Bapak-bapak yang mulia bahwa kita ada 654 daerah rawan narkoba, di Jakarta ada 117 Pak, di Jawa Timur ada 33 Pak. Ada cukup banyak rawan-rawan narkoba dan kita melakukan upaya-upaya *capacity building* Pak melatih terutama kita ajak BUMN Pak. BUMN dua tahun yang lalu kami presentasi dengan Pak Komisaris dengan Direksi BUMN. Tahun lalu kita dapat 21 daerah rawan Pak tahun ini 34 Pak. CSR-CSR mereka diarahkan ke sana untuk *capacity building* daerah rawan narkoba. Nah ini yang kita lakukan dan bagaimana tadi ada pertanyaan bagaimana dari teman-teman Komisi III yang mulia. Kami sangat mengharapkan Pak, jadi Bapak bisa bersama-sama kami untuk melakukan *capacity building* di daerah-daerah tersebut Pak daerah pemilihan bapak. Seperti Pak Hinca bersama-sama dengan kami dengan BNN kita lakukan pembinaan-pembinaan di wilayah.

Kami mengharapkan juga di daerah Jawa Timur juga ada, lalu ditempat-tempat ...(suara tidak jelas) di Jakarta juga ada di Priok di Jakarta ada 117 Pak ada Kampung Boncos dan lain-lain. Itu menjadi fokus kita dan kami juga saya informasikan kepada Pak Ketua bahwa BNN, KPK dan BNPT Pak kita Deputi Pencegahan sudah melakukan kerja sama bersama terutama untuk obyeknya sama Pak obyeknya sama tetapi kontennya beda. Nah ini juga kami bisa mengajak Bapak-bapak semua untuk ikut misalnya daerah ...(suara tidak jelas) Bapak misalnya ada di daerah mana itu bisa bicara tentang narkoba, tentang teroris, tentang korupsi dan kami fokus Pak untuk pembinaan ini kenapa disini kami fokus SMP SMA karena TK dan SD kamilah menjadi obyek kami Pak. Kita melalui ...(suara tidak jelas) itu yang kita lakukan untuk daerah-daerah yang rawan narkoba ini Pak. Lalu untuk

rehabilitasi Pak, rehabilitasi memang anggaran tidak terlalu banyak kami Pak. Kami bekerja sama dengan Menteri Kesehatan Menteri Sosial Pak diikuti oleh Menteri Menko PMK. Kita sudah membuat standarisasi rehabilitasi Pak, rehabilitasi standarisasi Pak.

Ini yang kita lakukan IPL-IPL yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan itu kita adakan pelatihan Pak. Kita kebetulan di BNN ada LSP Pak (Lembaga Sertifikasi Profesi) dengan BNCP jadi rata-rata semua kita latih mereka di anggaran ini kita gunakan kebanyakan untuk melatih untuk menjadi konsuler Pak, konsuler untuk rehabilitasi Pak. Lalu kami fokuskan Pak untuk pemerintah Pak yang kaya rumah sakit, BNN balainya BNN balai sosial kita fokuskan yang untuk rehab polentri Pak yang *compulsory* Pak *compulsory* yang wajib yang, yang ...(suara tidak jelas) Polisi ya kita lakukan asesmen lalu kita asesmen ada dua Pak hukum dan medis. Kalau hukumnya dia masuk jaringan atau bandar kita langsung peradilan umum Pak peradilan biasa. Lalu kalau yang merekanya sebagai pengguna dan *alhamdulillah* Pak dua tahun ini tugas kami di BNN cukup berat bagaimana merubah *mindset* Pak penyidik polisi, jaksa sama hakim dan mereka sudah latihan bersama Pak kita adakan latihan kita bekerja sama juga dengan MDC dan mereka juga satu persepsi Pak. Saya dengan ...(suara tidak jelas) bilang ini kalau begini bicara masalah *human right* ya kalau hanya sebagai pengguna tidak apa-apa masuk penjara mereka.

Nah ini kita sudah latihan Pak dan mungkin juga Komnas HAM bisa kita ajak bareng disini bagaimana Pasal 127 Pasal 54 di Undang-Undang Narkoba ini Pak bisa kita fokuskan Pak untuk masalah ini, ini yang ...(suara tidak jelas) berjalan Pak. Memang ada kendala bagaimana Pak kalau ada oknum ada penyimpangan nah itu kan kalau masing-masing instansi masing-masing punya pengawas. Ini yang kita sudah lakukan dan *alhamdulillah* sekarang sudah berjalan Pak jadi cuma yang ditangkap oleh Polisi tidak semua langsung masuk penjara karena hampir 40.000 sekarang ini yang di lapas dan ini kita kerja sama dengan Dirjen Lapas bagaimana mereka bisa kita rehabilitasi Pak khususnya pengguna Pak. Lalu kalau untuk banyaknya yang tadi saya sampaikan kita ada lebih kurang pelayan IPWL ada 749 Pak, dari Kementerian Sosial ada 350 Pak tempat-tempat pelayanan-pelayanan rehabilitasi.

Ini yang jadi kami anggaran kami tidak terlalu fokus untuk pelayanannya Pak tetapi kami fokus untuk pelatihan untuk ...(suara tidak jelas) tersebut Pak tetapi yang *compulsory* yang ketangkap-ketangkap Polisi itu memang wajib Pak karena negara yang bayar karena mereka gratis Pak untuk melakukan rehabilitasi. Lalu untuk yang swasta Pak kita melakukan pelatihan-pelatihan merekanya untuk ...(suara tidak jelas) untuk yang polentri Pak yang sukarela, misalnya ada anaknya menggunakan yang lain-lain, nah mereka bisa dirumah sakit atau ditempat-tempat rehab yang swasta bayar Pak. Nah ini kita coba kita bagi ke sana Pak supaya *alhamdulillah* Pak dari tahun 2011 kita sudah menurunkan ...(suara tidak jelas) polis kita berikan satu juta Pak, satu juta pengguna narkoba bisa pulih karena pengguna ini Pak kita melakukan upaya-upaya untuk pencegahan Pak.

Lalu yang selanjutnya masalah interdiksi Pak yang tadi saya sampaikan oleh Pak Hinca. Kita sedang berjalan Pak ini kisi kita Pak kita 7 (tujuh) pos perbatasan kita monitoring dan kita juga mungkin Bapak bisa sewaktu-waktu kita bisa datang ke posko kami Pak dipinggir pantai Pak itu juga hasil dari TPPU Pak dari hibah dari cita-cita dan sekarang menjadi BM-nya BNN.

Itu kita bisa pantau Pak kapal-kapal yang masuk Indonesia, pesawat-pesawat yang masuk Indonesia baik yang pakai ice maupun tidak pakai ice, manifest nah itu ...(suara tidak jelas) dari beacukai dari imigrasi dari Dirjen Perhubungan Laut Udara kita bisa masuk kesana Pak kita masuk database Pak. Lalu kita *sharing Pak* kita bekerja sama dengan yang tadi Bapak sampaikan memang BNN sebagai *secretary interdiction task force* Pak. Nah ini kita jalan terus Pak. Banyak informasi yang kita berikan kepada Polisi kita Pak yang ...(suara tidak jelas) besar-besar termasuk juga kita informasikan Jepang Pak, kita informasikan ke Thailand, kita informasikan ke Sri Lanka dan lain-lain. Ini data-data ini kita memang kita fokuskan ke sana Pak untuk masalah interdiksi ini.

Itu yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi terima kasih Pak atas dukungan anggaran Bapak. Kalau misalnya tambahan-tambahan apalagi tadi dukungan tambahan ini bisa diperlukan yang sangat kami perlukan Pak terutama untuk tempat-tempat rehabilitasi Pak dan perlu ...(suara tidak jelas) untuk rehabilitasi Pak. Kami sudah koordinasi dengan Menteri PUPR Pak, beliau siap untuk membangun tempat-tempat rehabilitasi Pak. Banyak Gubernur yang menghibahkan lahan-lahan Pak. Nah, ini juga kami berkoordinasi dengan PUPR atas izin Bapak Presiden memungkinkan untuk menggunakan anggaran PUPR untuk membangun tempat-tempat rehab yang ada diwilayah. Demikian Pak dari kami terima kasih atas dukungannya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Heru.

Pak Damanik silakan tolong terkait anggaran saja ya Pak ya singkat.

Terima kasih.

KOMNAS HAM (AHMAD TAUFAN):

Terima kasih Pak.

Tetapi mungkin ada baiknya saya klarifikasi sedikit karena sudah berapa kali disampaikan. Terima kasih kami tentu sangat senang kalau ada masukan, kiritik dan macam-macam tetapi mungkin perlu disini kami klarifikasi Pak. Di dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ada sub komisi pengkajian dan penelitian di Komnas HAM itu memang salah satu mandatnya Pak memberikan saran terhadap akses dan ratifikasi instrumen internasional terkait HAM.

Yang kedua adalah memberikan rekomendasi berdasarkan kajian ya itu mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan Perundang-Undangan yang terkait hak asasi manusia. Makanya ada masukan kami juga

ada Perpres Terorisme misalnya terhadap RKUHP juga dulu kita. Ada banyak yang kami sama pandangannya bahkan untuk kasus misalnya hukuman mati meskipun secara prinsipil Komnas HAM belum bisa menerima tetapi ke internasional kami katakan bahwa ini adalah satu titik yang merupakan kemajuan begitu karena kita tidak lagi segera melakukan tindakan hukuman mati ...(suara tidak jelas) ada mekanisme-mekanisme observasi dan lain-lain. Jadi ada banyak hal termasuk juga dengan Covid misalnya kalau Bapak-bapak misalnya mendengarkan beberapa penjelasan dari Menkumham yang lalu, asimilasi yang 50.000an itu rekomendasi Komnas HAM Pak dan kami terus memantau. Kami kasih lagi misalnya rekomendasi berikutnya bahwa masih ada dalam implementasinya itu agak keliru sehingga memang ada sekitar 40an kasus dari yang diasimilasi itu kemudian melakukan tindak pidana lagi begitu. Jadi memang tentu saja tidak mungkin dalam rangka mencampuri, karena rekomendasi kan tidak ...(suara tidak jelas) Pak tidak *legally binding* ...(suara tidak jelas) bisa di..

F.P-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):

Pimpinan interupsi Pimpinan.

Begitu Pak Komnas HAM jadi kalau memang masalah-masalah yang Undang-Undang itu diminta untuk mendapatnya mengenai masalah KUHP Terorisme itu memang ada kaitan dengan Komnas HAM. Namun ada surat Komnas HAM yang meminta omnibuslaw cipta kerja dibatalkan itu menjadi pertanyaan buat kita, karena tidak ada kaitannya Komnas HAM dengan omnibuslaw. Nah ini yang perlu diperjelas masalah ini. Jadi kalau yang lain-lainnya saya tidak ada masalah memang selama ini Komnas HAM memang diminta pendapatnya tetapi ada surat ke DPR RI yang meminta bahwa omnibuslaw cipta kerja ini kan merupakan suatu program dari pada pemerintah. Pemerintah ...(suara tidak jelas) DPR RI juga membahas masalah itu. Jadi ini suatu hal yang dimana Kelembagaan ini kita saling ini adalah merupakan lembaga yang memang lembaga pemerintah bukan LSM.

Nah itu saja catatan bagi saya, saya kira apa yang menjadi klarifikasi Bapak mengenai masalah itu memang kita membenarkan memang ada itu mengenai masalah terorisme dan KUHP dan segala macam itu memang berkaitan dengan masalah itu tetapi untuk Omnibuslaw dan cipta kerja Bapak mengatakan untuk ada surat seperti itu ini menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Jadi saya kira nanti itu dalam rangka pengawasan saja kita bahas lebih lanjut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira apa yang disampaikan Pak Wihadi

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., Shum., LL.M.):

Pimpinan saya sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terkait?

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., Shum., LL.M.):

Saya usul saja usul saja.

KETUA RAPAT:

Oke.

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., Shum., LL.M.):

Usul tadi catatannya sangat baik tetapi menurut saya agar kita juga fokus khusus yang anggaran saja yang ditanggapi tetapi mungkin catatan tadi bisa kita diskusikan dalam rapat-rapat kerja terkait dengan pengawasan. Jadi fokus kita pada anggaran saja Pimpinan apalagi waktu sebentar lagi kita akan paripurna.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan lanjut Pak.

KOMNAS HAM (AHMAD TAUFAN):

Terima kasih Pak.

Saya kira nanti mungkin ada baiknya kami kirimkan saja bahan-bahan yang kami dalam kajian kami itu kami anggap itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Nanti kami kirimkan secara tertulis kalau ada waktu mungkin kita bisa bertemu untuk mendiskusikan dalam kesempatan yang lebih khusus. Kemudian tadi sangat menarik Pak dari beberapa Anggota yang saya ingat salah satunya dari Pak Taufik Basari. Pak kita punya MoU Pak dengan Kapolri, dengan PKS-Nya ada dengan beberapa Kapolda dan kalau misalnya saya ambil contoh saja misalnya dalam penanganan kasus Mei dan September yang lalu Pak. Lima kasus Mei yang kemudian diambil tindakan oleh Kepolisian itu rekomendasi Komnas HAM Pak. Yang September di Sultra kemudian sekarang kasus Rendy dan Yusuf itu satu diantaranya juga atas rekomendasi Komnas HAM, karena temuan ...(suara tidak jelas) dari kami memang ada peluru yang ditembakkan ke kepala dan itu saya kira contohnya. Sekarang kita sedang bekerja dengan juga dengan BNPT dan dengan Kapolda Sulteng itu terkait dengan kasus Kidam Pak yang sampai diangkat oleh juga Majelis Ulama Pusat. Kami temuan kami sudah kami sampaikan rekomendasi kami sudah kami sampaikan menurut kami memang ini suatu pelanggaran harus proses hukum.

F.P-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):

Pimpinan ini bicara anggaran kalau ini menyampaikan ini bukan anggaran.

KETUA RAPAT:

Pak bisa dipersingkat terkait anggaran saja.

KOMNAS HAM (AHMAD TAUFAN):

Itu poinnya dan kami setuju Pak bahwa untuk meningkatkan kinerja Komnas HAM itu harus ada kerja sinergis yang sekarang sudah ada dengan Kepolisian dengan pelatihan-pelatihan dengan Densus tetapi untuk pelatihan dengan Densus memang anggarannya dari mereka Pak jadi kami memang tidak masukan dalam anggaran kami. Pelatihan dengan Polisi juga kebanyakan anggarannya dari mereka sehingga memang tidak kami masukan. Nah kerja sama dalam penanganan agraria memang dalam bentuk MoU Pak tetapi ada kesepakatan dengan Kementerian ATR-BPN Pak Soyan sudah menunjuk Wamen untuk menjadi penghubung Komnas dengan Menteri ATR-BPN. Dengan Kementerian KLHK langsung dengan Ibu Menteri dan dengan beberapa provinsi Pak kemarin dengan Provinsi Sumatera Selatan. Yang sudah ada MoU-Nya dengan Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Barat Pak jadi memang penanganan kita lebih cepat menasar kepada regulasinya karena kalau kasusnya Pak ada ribuan kasus Pak meskipun satu dua kasus yang kita anggap penting termasuk yang terakhir ...(suara tidak jelas) kami tangani langsung dalam bentuk kasusnya. Saya kira demikian

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III yang saya hormati,

Terima kasih atas dukungannya juga atas masukan-masukan kritik yang tajam kepada kami dan kami anggap itu bagian dari membangun komitmen membangun Komnas HAM sebagai kebutuhan di seluruh Bangsa Indonesia.

Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik sebelum ke PPATK waktu kita tambah 10 menit lagi ya.
Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Pak, singkat Pak terkait anggaran saja.

KEPALA PPATK (DIAN EDIANA RAE):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak atas pertanyaan dukungan dan juga saran yang disampaikan kepada PPATK akan kami sangat perhatikan. Secara singkat saja Pak mungkin kami ingin menyampaikan beberapa yang sekiranya penting kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Yang pertama pertanyaan terkait dengan kerja sama kita Pak...(suara tidak jelas) antara BNN Pak dengan BNPT. Saya kira ini sudah berjalan cukup baik bisa dikatakan sangat baik bahkan karena menurut catatan kami memang Pak semua kejahatan yang berkaitan ekonomi termasuk juga narkoba ini akan sangat tergantung kepada kemampuan kita untuk bisa mengambil aliran darahnya ini Pak dan darahnya itu adalah uang. Jadi kalau dikejar penjahatnya dalam waktu bersamaan dikejar uangnya itu adalah jalan yang paling efektif sehingga kami memang dengan BNN kemarin juga baru melakukan pertemuan untuk meningkatkan bagaimana caranya untuk bisa menindak justru bandar-bandarnya Pak dalam hal ini.

Sudah ada hampir 100 sosial analisis dan hasil pemeriksaan dari PPATK yang disampaikan kepada BNN Pak untuk dan kasus-kasus besar sudah kita ungkap (rekaman terputus) Rp 38,5 miliar sekarang kita tingkatkan menjadi Rp 63 miliar Pak itu yang kami harapkan ada tambahan sebesar hampir 15 miliar tersebut tentu mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang sekarang masih bukan masih Pak mungkin semakin meningkat bisa dikatakan begitu dengan segala macam pola...(suara tidak jelas). Kira-kira begitu Bapak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian secara singkat yang lain-lain mungkin akan kami jelaskan kemudian Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Hasto.

KETUA LPSK (HASTO ATMOJO SURYO):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan Komisi III dan Bapak-Bapak Anggota Komisi III,

Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan bapak-bapak sekalian terhadap usulan kami untuk penambahan anggaran, terutama kepada Pak Rano, pada Pak Santoso, Pak Wihadi, Pak Arteria, Pak Taufik Basari, Pak Hinca Pandjaitan dan Pak Supriansa yang tadi sudah menyampaikan dukungan yang menunjukkan pemahaman terhadap permohonan penambahan anggaran dari LPSK. Memang penambahannya lebih dari 100% dari anggaran yang sudah dijadikan sebagai pagu indikatif tetapi karena memang itu ada sejumlah anggaran yang cukup besar bagi LPSK untuk menyelesaikan kompensasi korban tindak pidana masa lalu, tindak pidana terorisme masa lalu yang harus selesai pada tahun 2021. Mengapa tahun 2021 harus selesai karena itu dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa penyelesaian kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu itu diberi waktu hanya 3 tahun setelah

Undang-Undang ini diundangkan pada tahun 2018. Oleh karena itu saat ini kami sudah membentuk tim percepatan dikantor untuk menyelesaikan persiapan-persiapan untuk melakukan sosialisasi maupun asesmen dalam rangka penyelesaian kompensasi tindak pidana terorisme masa lalu ini. Yang kedua kami juga berterima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tentang prolegnas.

Ini senafas dengan apa yang kami rasakan di LPSK karena kami juga merasakan perlunya perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terutama dalam rangka penguatan dan pengokohan peran dan fungsi LPSK dalam sistem peradilan pidana tentu saja untuk kepentingan masyarakat kelompok, saksi dan korban di Indonesia. Terakhir saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Hinca Pandjaitan kami selalu tertarik dengan ungkapan Pak Hinca ini “dulu datang tidak menggenapkan, tidak datang tidak mengganjilkan” sekarang ini Pak Hinca mudah-mudahan LPSK bisa menjadi malaikat yang bersayap. Mudah-mudahan doa Pak Hinca ini terkabul dan sayap-sayap kami yang bulunya sedang tumbuh bisa lebih tebal dan kami akan bisa terbang lebih tinggi lagi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Kita semua tadi telah mendengarkan sanggahan jawaban dari mitra kerja kita atas pertanyaan kawan-kawan Anggota Komisi III. Selanjutnya kita bahas rancangan kesimpulan silakan ditayangkan. Kesimpulan kita yang pertama saya bacakan.

1. Komisi III DPR RI dapat menerima:

- a) Pagu anggaran BNN Rp 1.689.992.511.000. Usulan tambahan yang diajukan Rp 234.054.960.000,
- b) Pagu anggaran BNPT untuk tahun 2021 sebesar Rp 515.919.444.000 dengan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 304.764.098.000,
- c) Pagu anggaran PPATK sebesar Rp 224.608.345.000 dengan usulan tambahan sebesar Rp 14.955.000.000,
- d) Pagu anggaran LPSK tahun 2021 sebesar Rp 79.417.515.000 dengan tambahan sebesar Rp 129.104.361.900,
- e) Pagu anggaran Komnas HAM untuk tahun 2021 sebesar Rp 750.871.684.000 dengan tambahan sebesar Rp 22.800.000.00,

KETUA KOMNAS HAM (AHMAD TAUFAN):

Izin Pak Ketua.

Komnas HAM keliru Pak.

KETUA RAPAT:

Berapa?

KETUA KOMNAS HAM (AHMAD TAUFAN):

100 miliar 231 Pak bukan 700 Pak.

KETUA RAPAT:

Betulkan.

KETUA KOMNAS HAM (AHMAD TAUFAN):

Alhamdulillah kalau dikasih segitu Pak tetapi.

KETUA RAPAT:

Ayo ayo betulkan Komnas HAM E. Ya betul Pak ya koreksinya. Selanjutnya

2. Komisi III DPR RI meminta laporan penggunaan anggaran semester I dan rencana belanja semester II tahun 2021 pada raker evaluasi APBN berjalan dengan catatan apabila terdapat belanja barang dan belanja modal yang tidak prioritas dapat dialihkan atau direalokasi.
Setuju Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik dengan selesainya pembicaraan rapat kita pada hari ini maka berakhirlah rangkaian seluruh kegiatan kita. Dengan demikian saya tutup rapat ini dengan mengucapkan *alhamdulillah*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.22 WIB)

Jakarta, 15 September 2020

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001